

# **Perubahan Sistem Pertanian Padi dalam Perspektif Efisiensi Sosial: Hasil Penelitian 12 Desa di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan**

## **ABSTRACT**

*The study aims to fill the shortage of micro-level research on small-scale agriculture in Indonesia, by showing important changes have occurred in small-scale rice farming systems in several rice-producing villages in Indonesia. Small-scale farming in this study is examined in relation to social efficiency framework, which focuses on the equitable distribution of resources in a society. This study found that many common assumptions made by today's agricultural community in Indonesia needs to be scrutinized. These include the relationship between farm size and productivity, the reality of rural agricultural institutions, the inequality of the existing agrarian structure, and the impact on young generation. This study used mixed methods, including analysing statistical data, such as the Census of Agriculture, Region in Figures, IFLS, policy documents, district and villages data. In addition, quantitative methods were used including transects, FGDs, in-depth interviews with key actors, and survey of 30 households in each village.*

*Keywords: small-scale agriculture, social efficiency, social re-production, rice farming system, Indonesia*

## **I. PENDAHULUAN**

Pertanian padi skala kecil memiliki multi peran pada sektor pertanian Indonesia. Sampai saat ini, pertanian padi skala kecil berperan sebagai penyedia utama pangan bagi rakyat Indonesia. Hasil produksi padi pertanian skala kecil menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, peningkatan hasil panen tetap membuat Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor beras. Selama kurun waktu 2005-2013, jumlah impor tertinggi terjadi pada tahun 2011, dimana pada tahun yang sama terjadi penurunan hasil produksi. Jumlah impor beras memiliki nilai yang relatif bervariasi. Berikut ini merupakan gambaran hasil produksi dan impor beras di Indonesia selama 2005-2013.

### **Tabel 1**

#### **Hasil Produksi Dan Impor Beras di Indonesia Tahun 2005-2013**



*Sumber : BPS dan Pusdatin Departemen Pertanian*

Posisi Indonesia yang menjadi negara pengimpor besar, meskipun relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi domestik, menyebabkan Indonesia rentan dalam upaya pemenuhan konsumsi beras domestik. Keadaan tersebut disebabkan pasar dunia beras relatif tipis. Faktanya, Negara-negara produsen beras terbesar, mengonsumsi hampir semua produksi berasnya di dalam negeri. Hanya sebagian kecil dari total produksi tersedia untuk diekspor. Perkembangan isu terkait perubahan iklim pun membuat pasar pangan terutama beras relatif lebih tipis lagi dan tidak menentu dalam tahun-tahun mendatang.

Selain sebagai penyedia utama pangan bagi rakyat Indonesia, pertanian skala kecil juga merupakan penyedia kesempatan kerja yang paling besar di Indonesia. Tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja terbesar dengan jumlahnya mencapai 38,23 juta jiwa pada Februari tahun 2012 atau 33,89% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya. Tenaga kerja pertanian tersebut tersebar ke dalam empat sub sektor pertanian, dimana penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sub sektor tanaman pangan sebesar 53,21% dari total tenaga kerja di sektor pertanian<sup>1</sup>. Sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi rumah tangga di pedesaan. Pada Maret 2013, tingkat kemiskinan tertinggi berada di pedesaan sebesar 63,2% sedangkan sisanya berada di perkotaan<sup>2</sup>. Oleh karena itu, mendukung sektor pertanian skala kecil maka akan mengurangi kemiskinan di pedesaan<sup>3</sup>.

Di sisi lain, sejak tahun 2011 Pemerintah memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dimana salah satu rencana adalah membangun pertanian padi secara terpusat seperti di Sulawesi Selatan, sedangkan Jawa lebih difokuskan kepada sektor pertambangan<sup>4</sup>. Padahal, Jawa masih menduduki produktivitas tertinggi tingkat nasional, yaitu menyumbang 52,6%<sup>5</sup> produksi padi nasional. Selain itu, pemerintah juga memiliki

<sup>1</sup>Pusdatin Kementerian Pertanian, 2014

<sup>2</sup> BPS, 2013

<sup>3</sup> BPS, 2013

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013

<sup>5</sup> Olah data BPS 2013

gagasan mengenai *rice estates*<sup>6</sup> yang justru dapat mengancam ketahanan pangan dalam negeri karena dikendalikan oleh BUMN dan korporasi. Kekhawatiran tersebut muncul karena keputusan-keputusan perberasan akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga pangan dunia, dimana Negara atau korporasi akan lebih memilih untuk menjual persediaan pangan jika harga di dalam negeri relatif lebih rendah dibandingkan di luar negeri. Hal yang mungkin saja terjadi, karena BUMN adalah perusahaan negara yang bertugas mencari keuntungan seperti pada kasus Pertamina.

Kebijakan lain yang saat ini sedang berjalan adalah menggeser generasi muda menjadi pekerja mandiri yaitu berwirausaha atau bergeser ke sektor jasa. Kebijakan tersebut menjadi ancaman keberlanjutan pertanian terutama sektor pangan di masa datang. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, pada akhirnya akan mempengaruhi produksi dan persediaan padi secara nasional, selain juga berpengaruh pada penyediaan kesempatan kerja dan juga pemerataan distribusi pendapatan.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru mengenai perubahan yang terjadi pada sistem pertanian padi skala kecil saat ini, dengan membahas hasil penelitian Akatiga di 12 desa terpilih di tiga propinsi penghasil beras (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan). Setelah mengungkap latar belakang dari pentingnya pertanian padi skala kecil, bagian ke dua akan membahas tentang tujuan, kerangka dan metodologi penelitian, bagian ketiga akan membahas tentang perubahan sistem pertanian padi terkait (1) akses terhadap lahan, (2) institusi pertanian, (3) hasil panen, (4) hambatan dalam meningkatkan hasil produksi, (5) teknologi dan praktik bertani, (6) petani pintar, eksperimen, dan keberlanjutan, (7) proses ketenagakerjaan : penggunaan tenaga kerja, cara merekrut dan sistem pengupahan, dan (8) keberlanjutan pertanian padi skala kecil. Bagian keempat merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan pertanian padi skala kecil.

## II. TUJUAN, KERANGKA, DAN METODOLOGI

### **Tujuan**

Indonesia memiliki tradisi panjang penelitian tingkat mikro tentang keadaan dan perubahan pertanian pangan, mulai dari akhir zaman kolonial sampai dengan penelitian Survei Agro-Ekonomi tahun 1960an-1980an.<sup>7</sup> Namun sejak itu, sedikit ditemukan penelitian sistematis, pada tingkat mikro, yang melihat pola serta dinamika pertanian skala kecil dan keseriusan untuk memperbaiki sektor pertanian. Studi ini bertujuan untuk sedikit mengisi kekurangan tersebut, dengan cara menguraikan perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam sistim pertanian padi skala kecil pada tingkat di berbagai wilayah penghasil padi utama di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menyoroiti realitas yang terjadi di dalam sektor pertanian padi di Indonesia.

### **Kerangka**

---

<sup>6</sup> <http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-8709-food-estate-ketapang-mendukung-surplus-10-juta-ton-beras.html>

<sup>7</sup>lihat Faisal Kasryno (ed),

Studi ini menggunakan kerangka analitis yang mengandalkan enam konsep utama yaitu: konsep reproduksi sosial, konsep rejim ketenagakerjaan, konsep akses, konsep diferensiasi agraris, konsep peralihan nilai antar pelaku, konsep dinamika interaksi sektor farm dan non-farm. Kemudian sebagai alat analitis untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi digunakan konsep efisiensi sosial. Di bawah ini masing-masing konsep tersebut diuraikan secara singkat.

#### *a. Reproduksi sosial*

Reproduksi sosial didefinisikan “*the material and discursive practices which enable the reproduction of a social formation (including the relations between social groups) and its members over time (praktik perilaku maupun diskursus yang memungkinkan reproduksinya suatu formasi sosial dengan anggotanya dari waktu ke waktu (termasuk juga reproduksi hubungan antar golongan sosial didalamnya)*”<sup>8</sup>. Konsep ini bisa diterapkan pada berbagai tingkat: mulai dari keluarga, rumah tangga atau usahatani sampai komunitas lokal, golongan sosial/etnis tertentu, dan sebagainya. Selain itu, konsep reproduksi sosial bisa diterapkan untuk berbagai tenggang waktu, misalnya: reproduksi dari hari ke hari, dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

Proses reproduksi sosial dapat dilihat dari perubahan dari waktu ke waktu dalam (1) ketersediaan akses petani terhadap sumber daya seperti tanah, modal, tenaga kerja, input pertanian, subsidi, serta hubungan antaraktor dalam hulu hilir pertanian padi (2) praktik-praktik yang dilakukan dalam setiap tahapan pertanian padi, (3) produktivitas pertanian skala kecil dan hambatannya, (4) penyerapan tenaga kerja dalam pertanian skala kecil, (5) masa depan pertanian skala kecil. Sistem ketenagakerjaan disini memiliki arti luas, yaitu mobilisasi tenaga kerja dan pengorganisasian dalam sistem produksi, dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik.<sup>9</sup>

#### *b. Konsep ‘akses’ dalam konteks studi agraria/perdesaan*

Peluso dan Ribot (2003) mendefinisikan konsep akses sebagai “kemampuan untuk menikmati untung dari sesuatu” (*the ability to benefit from things*). Fokus pada “kemampuan” ini (bukan hanya pada “hak” seperti halnya dengan teori kepemilikan) memungkinkan kita untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan kepemilikan. Dengan demikian, gagasan Peluso dan Ribot ini mempermudah analisis yang lebih nyata tentang siapa yang sebenarnya menguasai dan menikmati keuntungan dari sumber daya, dan tentang dinamika proses yang memungkinkan hal itu terjadi.<sup>10</sup>

#### *c. Konsep diferensiasi agraris*

“Diferensiasi agraris’ (*agrarian or rural differentiation*) adalah suatu proses dinamis yang menyangkut munculnya dan/atau makin tajamnya perbedaan antargolongan dalam penduduk perdesaan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan antargolongan, tetapi lebih mementingkan perubahan dalam hubungan antargolongan (sesama petani maupun antara petani dan bukan-petani) sejalan dengan proses komoditisasi pertanian dan ekonomi perdesaan. Diferensiasi berarti juga suatu proses perubahan dalam mekanisme peralihan surplus dari mereka

---

<sup>8</sup> Wells, 2009

<sup>9</sup> Bernstein, 1998.

<sup>10</sup> Peluso dan Ribot (2003: 153-4)

yang bekerja di atas tanah kepada mereka yang mengklaim sebagian dari hasil tanah tersebut, berdasarkan penguasaan mereka atas sumber daya produksi. Dalam menjelaskan struktur agraris, studi ini menggunakan enam kategori kasar untuk membedakan petani di desa penelitian, yaitu Petani Modal Kuat, Petani Luas, Petani Menengah I, Petani Menengah II, Petani Sempit, dan Buruh Tani tak Bertanah. Kriteria 'penguasaan' yang dipakai menggunakan indikator luas usahatani.<sup>11</sup>

#### *d. Regim ketenagakerjaan agraris (agrarian labour regime)*

Konsep rejim ketenagakerjaan agraris adalah alat untuk menggambarkan struktur agraris, dilihat dari perspektif hubungan ketenagakerjaan. Dengan menyoroti '*methods of mobilizing labour and organizing it in production*'<sup>12</sup>, misalnya hubungan ketenagakerjaan intrakeluarga, hubungan majikan-buruh, hubungan pemilik-penggarap, dapat dilihat pengaruh hubungan ketenagakerjaan terhadap arus nilai yang beralih antarpihak atas dasar hubungan tersebut.

Berstein (2010) melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan konsep diferensiasi agraris serta rejim ketenagakerjaan, secara empiris menfokuskan pada empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa (penguasaan)? siapa yang melakukan apa? dan siapa yang mendapatkan apa? (rejim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut? (pola reproduksi/akumulasi).

#### *e. Peralihan nilai antar pelaku dan antar golongan*

Konsep peralihan nilai (*surplus transfer, surplus capture*) sebagai alat untuk menggambarkan dinamika struktur agraris dan proses reproduksi usahatani dan masyarakat tani pertama kali diuraikan secara rinci oleh Deere & de Janvry (1979). Penulis menggambarkan 9 mekanisme yang (secara potensial) bisa mengakibatkan peralihan nilai dari petani kecil ke pihak lain yaitu: sistem sewa tanah (dalam bentuk hasil bumi), sewa tanah (dalam bentuk tenaga kerja), sewa tanah (dalam bentuk uang), sistem pengupahan (natura), pengupahan (uang), bunga pinjaman, pajak, dan nilai tukar petani. Selain itu, tentunya ada kemungkinan akan muncul mekanisme lain misalnya yang berdasarkan paksaan, penangkapan subsidi/dana lain oleh elit lokal, dan sebagainya.

#### *f. Hubungan luas usahatani dengan produktivitas*

Dalam studi agraria telah terjadi perdebatan yang panjang terkait ada/tidaknya hubungan berbanding lurus atau balik antara luas usahatani dan produktivitas usahatani (dalam arti hasil per ha.). Pada banyak penelitian di Negara lain ditemukan hubungan berbanding balik (*inverse relationship*).<sup>13</sup> Perdebatan ini masih relevan untuk Indonesia masa kini, melihat banyak ekonom pertanian, teknokrat dan pembuat bijak, juga golongan menengah dan elit perkotaan, yang (sangat)

---

<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Laporan Penguasaan Tanah Pertanian Dan Struktur Agraris Di Beberapa Desa Penghasil Padi

<sup>12</sup>(Bernstein 2010: )

<sup>13</sup> Lihat antara lain Lipton (2009: Ch 2), Berry (2011)

yakin bahwa usaha pertanian skala-besar tentunya adalah lebih 'efisien' dibanding petani skala kecil atau gurem.

*g. Interaksi akses dan kegiatan pertanian dan bukan-pertanian dalam proses akumulasi dan diferensiasi sosial-ekonomi masyarakat desa*

Studi White dan Wiradi pada tahun 1989 yang menyoroti perubahan dalam 9 desa di Jawa selama periode 1971-1981 menunjukkan bahwa tanah merupakan sumber daya utama yang sangat mempengaruhi akumulasi modal rumah tangga petani (RTP). Akumulasi modal di sektor bukan-pertanian berbanding lurus dengan pemilikan tanah. Rumah tangga petani yang menguasai tanah yang luas juga memiliki kekuatan untuk melakukan akumulasi modal pada sektor bukan-pertanian. Akhir-akhir ini, peranan hubungan sektor pertanian dan bukan-pertanian dalam proses diferensiasi sosial dan pembentukan kelas di perdesaan menjadi bahan perdebatan. Misalnya, studi baru tentang proses perubahan perdesaan dalam 14 lokasi di Asia Tenggara<sup>14</sup> menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang mempengaruhi sifat dan proses perubahan, diantaranya makin pentingnya kegiatan bukan-pertanian dan pola berpenghasilan ganda; fleksibilisasi dan "feminisasi" kerja di perdesaan; makin intensnya interaksi perdesaan-perkotaan, serta makin pentingnya migrasi domestik maupun internasional.<sup>15</sup> Dalam studi yang sama, Rigg Hirsch dan Vandergeest mengusulkan suatu "politik ekonomi agraris yang baru" dimana para petani dilihat sebagai "kelas yang sedang dibentuk kembali dengan pengaruh kekuatan-kekuatan globalisasi", "kelas" tidak lagi ditentukan terutama oleh penguasaan tanah dan hubungan produksi agraris, tetapi bersifat "multidimensional". Hal ini membawa kita kearah pengertian *inequality* perdesaan yang lebih bernuansa dan lebih dinamis, tidak hanya berdasarkan penguasaan atas tanah.<sup>16</sup> Meskipun porsi sektor pertanian menurun dengan adanya semua perkembangan ini<sup>17</sup>, namun pertanian masih merupakan sektor dan pemberi lapangan kerja yang paling besar, dan menjadi unsur penting dalam proses diferensiasi sosial ekonomi.

Pada saat ini, tanah bukan satu-satunya faktor penentu akumulasi modal dan diferensiasi sosial-ekonomi dalam masyarakat petani meskipun di beberapa desa penelitian masih menunjukkan struktur yang sama dengan yang terjadi di desa-desa (White dan Wiradi, 1989). Akumulasi modal pada rumah tangga petani dipengaruhi juga oleh akses petani terhadap kesempatan di luar pertanian.

*h. Konsep efisiensi sosial*

Seluruh penggambaran sistem reproduksi sosial pertanian padi akan dianalisa dampaknya terhadap efisiensi sosial. Efisiensi sosial sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini dipilih

---

<sup>14</sup> Rigg dan Vandergeest eds (2012)

<sup>15</sup>De Konincke et al, (2012 )

<sup>16</sup>*ibid*, p. 20-22

<sup>17</sup>*ibid*, p. 32

karena merupakan kondisi dimana distribusi sumber daya di dalam suatu masyarakat mencapai titik yang optimal. Efisiensi disini bukanlah merujuk pada pendapat umum seperti produktivitas tenaga kerja atau mendapatkan keuntungan dari minimnya usaha yang dilakukan. Konsep efisiensi harus memenuhi tujuan dan kunci utama pembangunan untuk masyarakat. Dari itu, kita perlu memikirkan sistem pertanian yang paling baik dalam menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja dan seberapa banyak pendapatan yang masuk untuk orang miskin. Hal – hal ini sangat relevan sebagai tujuan kebijakan (Berry 2011 : 641). Sektor pertanian sebenarnya bisa menghidupi banyak orang dengan menyerap tenaga kerja yang tinggi dan membagi keuntungan yang lebih baik kepada lebih banyak orang. Oleh karena itu, kerangka efisiensi sosial pada penelitian sektor pertanian pada sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Kriteria yang tepat untuk menilai efisiensi sosial (dan bobot relatif yang kita berikan kepada masing-masing) juga dapat disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, serta periode tertentu dalam pembangunan. Sebagai contoh, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini (ketika beras dan makanan lainnya kini diimpor dalam skala besar, harga pangan tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan pekerjaan dengan gaji yang tidak layak, serta masalah lingkungan menjadi serius), kita bisa mengatakan bahwa jenis dan bentuk sistem pertanian yang dinilai paling efisien dari segi sosial dan ekonomi akan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Mendukung peningkatan produksi, (2) Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3) Mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, (4) Mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013).

Semangat efisiensi sosial di atas sebenarnya sudah didukung oleh beberapa kebijakan dan perhatian pemerintah Indonesia. Misalnya yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada bab II pasal 2 menyatakan bahwa salah satu asas yang melandasi perlindungan dan pemberdayaan petani adalah asas efisiensi-berkeadilan, kedaulatan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Beberapa asas yang disebutkan sejalan dengan efisiensi sosial, yaitu Undang \_ Undang ini secara tegas menyatakan bahwa petani memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, dan penyelenggaraan UU ini harus secara konsisten mendukung kesejahteraan petani.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian studi ini terdiri dari 12 desa yang tersebar di 6 kabupaten dan 3 provinsi di Indonesia. Pemilihan didasarkan pada karakteristik khusus dari setiap lokasi sebagai lumbung padi nasional maupun lokal di daerahnya masing-masing. Jawa Barat dan Jawa Tengah terpilih karena termasuk provinsi dengan produksi beras paling tinggi di Indonesia. Sedangkan Sulawesi Selatan terpilih karena dicanangkan sebagai pusat lumbung padi nasional dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. 12 desa/kelurahan terpilih yaitu Cibalongsari dan Kedawung (Karawang, Jawa Barat), Karang Layung dan Wanguk (Indramayu, Jawa Barat), Sidomulyo dan Harjodowo (Kebumen, Jawa Tengah), Mulyasari dan Widarapayung Wetan (Cilacap, Jawa Tengah), Ceppaga dan Awolagading (Bone, Sulawesi Selatan), Pincengpute dan Wele (Wajo, Sulawesi Selatan). Lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan karakter yang

bertolak belakang dari setiap desa/kelurahan. Dengan cara pemilihan desa sampel ini, sengaja menunjukkan tingkat heterogenitas antardesa yang tinggi.

**Tabel 2**  
**Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian**

Propinsi	Kabupaten	Desa/Kelurahan	Kriteria Pemilihan Lokasi
<b>Jawa Barat</b>	• Karawang	1. Cibalongsari	a. Lumbung padi nasional
		2. Kedawung	b. Tantangan alih fungsi sawah ke non – sawah
	• Indramayu	3. Karanglayung	c. Pergeseran struktur tenaga kerja muda dari pertanian ke sektor industri dan jasa
		4. Wanguk	
<b>Jawa Tengah</b>	• Kebumen	5. Sidomulyo	a. Lumbung padi nasional
		6. Harjodowo	b. Tantangan alihfungsi sawah ke non – sawah
	• Cilacap	7. Mulyasari	c. Ketersediaan pekerjaan non-farm di dalam desa
		8. Widarapayung Wetan	
<b>Sulawesi Selatan</b>	• Bone	9. Ceppaga	a. Ditentukan sebagai lumbung padi nasional berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI)
		10. Awolagading	
	• Wajo	11. Pincengpute	
		12. Wele	

### Metodologi Penelitian<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data statistik dari Sensus Pertanian, Daerah Dalam Angka, IFLS dan lainnya, dianalisis untuk mendapatkan gambaran makro dari kondisi pertanian di Indonesia, sekaligus menjadi gambaran awal dari wilayah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menganalisis data sekunder seperti dokumen kebijakan, data kabupaten, data desa, dan lainnya. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mikro yang mendalam.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai dalam Studi Kemandirian Pangan, yaitu mengolah data sekunder, transek, diskusi kelompok, dan wawancara mendalam. Selain itu dilakukan survey kepada 30 rumah tangga di setiap desa/kelurahan dengan sampel dipilih sedemikian rupa sehingga secara kasar mencerminkan struktur agraris di masing-masing desa. Berbagai teknik ini dilakukan untuk saling melengkapi informasi, melakukan konfirmasi (verifikasi data), dan triangulasi. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat menjadi data utuh yang valid.

## III. PERUBAHAN SISTEM PERTANIAN PADI DI 12 DESA PENELITIAN

### III. 1. Akses Terhadap Tanah<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Untuk penjelasan mengenai metodologi Studi Kemandirian Pangan, lihat [www.akatiga.org](http://www.akatiga.org)



Penelitian ini menemukan jumlah buruh tani dan petani tanah sempit, tinggi pada desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan relatif rendah. Kepemilikan sawah yang luas dikuasai oleh pemilik yang jumlahnya kecil di kebanyakan desa. Kepemilikan ini tidak menimbulkan unit usahatani padi skala besar, tetapi kepemilikan sawah yang luas meningkatkan jumlah petani penggarap khususnya petani penggarap bagi hasil dan penggarap penyewa. Keadaan tersebut mempengaruhi distribusi pendapatan. Bagian ini akan memperlihatkan mengapa jumlah buruh tani dan petani sempit, tinggi pada desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, namun di desa-desa penelitian Sulawesi rendah? serta bagaimana pola-pola penguasaan tanah pada desa-desa penelitian dan dampak yang ditimbulkan oleh dari pola-pola penguasaan terhadap tanah?

### *Pola Kepemilikan dan Penguasaan Tanah*

Pada umumnya, struktur kepemilikan dan penguasaan sawah pada 12 desa penelitian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan cenderung tidak merata, dan di beberapa desa mendekati polarisasi kecuali Ceppaga. Selain itu, kepemilikan *absentee* yang besar terdapat pada 2 desa penelitian, yaitu Cibalongsari dan Wele.

Persentase Rumah Tangga Petani (RTP) yang menguasai tanah luas diatas 2 ha dengan jumlah yang besar terdapat di Wele, yaitu sebanyak 36%, sedangkan persentase petani yang menguasai tanah di atas 2 ha di desa-desa penelitian lainnya relatif lebih kecil, yaitu antara 3% - 15%. Persentase penguasaan tanah 1-2 ha yang relatif besar, yakni 27 - 57% terdapat pada seluruh desa penelitian di Sulawesi Selatan dan 1 desa penelitian di Jawa Barat yaitu Kedawung. Sedangkan persentase untuk penguasaan tanah diatas 0,25 - 0,99 ha cenderung merata di semua desa penelitian kecuali Awolagading. Penguasaan tanah dibawah 0,25 ha yang cukup besar, antara 36-46% berada di seluruh desa penelitian di Jawa Tengah dan 1 desa penelitian di Jawa Barat yaitu Cibalongsari. Persentase buruh tani terbesar yaitu 40-60% terdapat pada desa-desa penelitian di Jawa Barat, sedangkan persentase buruh tani pada desa- desa penelitian di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah relatif lebih kecil yaitu antara 1- 20% dari total jumlah rumah tangga usahatani.

Pola kepemilikan dan penguasaan tanah pada 12 desa penelitian menyebabkan banyak petani penggarap karena pada umumnya pemilik tanah luas tidak mau mengelola usahatani. Pemilik tanah luas juga sibuk memiliki pekerjaan lain di luar sektor pertanian padi sehingga kurang memiliki waktu untuk mengurus sawah. Oleh karena itu, pemilik tanah luas memilih untuk menggarapkan sawahnya dengan sistem bagi hasil atau sewa agar dapat membagi atau mengurangi resiko dengan petani lain. Jumlah petani penggarap tertinggi terdapat di Wele sebanyak 60% dan selanjutnya ada di Cibalongsari sebanyak 36%.

Perlu dicatat bahwa terdapat 10 diantara 12 desa penelitian, jumlah RTP yang tidak memiliki tanah melebihi jumlah petani pemilik. Anggapan umum yang masih dipegang oleh banyak orang kota dan banyak pejabat, bahwa masyarakat desa kebanyakan terdiri dari rumah tangga tani yang memiliki sebidang, merupakan salah satu mitos yang menghambat pembangunan di bidang pertanian padi,

---

<sup>19</sup>Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada laporan Penguasaan Tanah Pertanian dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi (Harahap dan Ambarwati, 2014).

padahal struktur penguasaan atas tanah yang tidak merata (dan di beberapa desa penelitian sangat tidak merata) merupakan ancaman untuk kesempatan kerja dan pemerataan (efisiensi sosial).

Jumlah buruh tani di desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih tinggi daripada di Sulawesi Selatan. Misalnya penjualan tanah di Kedawung dan Hardjodowo menyebabkan bertambahnya jumlah buruh tani tak bertanah. Jumlah buruh tani menjadi bertambah sedangkan kesempatan kerja mereka menjadi berkurang karena pengelolaan usaha tani bergeser menggunakan orang kepercayaan. Sementara itu, penjualan tanah pada desa-desa di Sulawesi Selatan tidak serta merta membuat bertambahnya jumlah buruh tani tak bertanah. Hal itu terjadi karena ketersediaan tanah yang masih luas. Pemilik yang menjual tanah tidak serta merta menjadi buruh tani tak bertanah, hanya saja luas usaha tani menjadi berkurang. Akses mereka untuk menjadi petani penggarap masih terbuka lebar.

### *Mekanisme Kepemilikan dan Penguasaan Tanah*

Terdapat beberapa cara menguasai tanah di 12 desa, diantaranya adalah penguasaan tanah dengan cara warisan dari orang tua, membeli tanah, menyewa tahunan, bagi hasil dan gadai. Mayoritas yang dianggap petani adalah laki-laki, karena umumnya laki-laki yang mengambil peranan atau mengelola usahatani, namun terdapat perbedaan di salah satu desa yaitu satu orang perempuan menguasai dan mengelola sendiri sawah tersebut dikarenakan suaminya sudah meninggal dan orangtua sudah tua.

Penguasaan tanah dengan cara warisan dari orangtua adalah mekanisme yang lazim ditemukan di semua desa. Pada umumnya anak laki – laki dan perempuan mendapatkan tanah warisan dengan luasan yang sama, meskipun juga terdapat desa yang menerapkan pewarisan dengan cara Islam<sup>20</sup>. Mekanisme lain untuk menguasai tanah adalah dengan cara membeli, dan biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki modal yang berasal dari pekerjaan pertanian padi maupun non padi. Mata pencaharian tersebut diantaranya adalah nelayan, tengkulak, pemilik mesin penggilingan padi, pedagang, PNS, buruh migran, pegawai swasta, atau pensiunan TNI/POLRI dan PNS. Sedangkan para petani yang tidak dapat mengakses tanah dengan warisan atau membeli, dapat mengakses tanah dari pemilik tanah luas dengan cara bagi hasil, sewa, dan gadai.

Selain warisan dan membeli, terdapat sistem bagi hasil yang ditemukan di 12 desa penelitian sebagai akibat konsentrasi kepemilikan dan kecenderungan pemilik luas untuk tidak mengelola tanahnya sendiri. Bagi hasil merupakan satu-satunya cara untuk mengakses tanah bagi orang miskin/tidak bermodal. Terdapat bagi hasil 2 dan 3 di desa – desa penelitian dengan pembagian biaya produksi yang disepakati. Dari kedua sistem bagi hasil di desa penelitian di Sulawesi Selatan, seluruh resiko gagal panen ditanggung oleh penggarap.

Dalam perkembangannya, pada kebanyakan desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan perubahan yang mengarah dari bagi hasil ke sistem sewa. Sewa dianggap lebih aman bagi pemilik tanah karena mereka bisa menaikkan keuntungan dan mengalihkan seluruh resiko kepada penyewa. Penyewa tanah memberikan uang muka atau seluruh biaya sewa dibayar di

---

<sup>20</sup>Mekanisme pewarisan Islam adalah laki – laki mendapatkan jumlah bagian 2 kali lebih banyak dari bagian yang diterima oleh perempuan.

depan, sehingga resiko gagal panen ditanggung oleh petani penyewa. Jika terjadi gagal panen, petani penyewa tetap harus membayar uang sewa kepada pemilik tanah dengan berbagai strategi, salah satunya adalah berhutang kepada keluarga. Sistem sewa individu banyak memberatkan petani yang tidak memiliki tanah atau petani yang relatif miskin, karena harga sewa tinggi dan harus dibayar muka, sehingga praktis tidak terjangkau oleh yang tidak bermodal.

Adapula tanah bengkok, tanah kemakmuran, tanah pemerintah, dan milik perusahaan memiliki harga sewa yang relatif lebih murah dari pada harga sewa tanah individu. Hal ini banyak ditemui di desa – desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Misalnya di Sidomulyo, terdapat tanah kemakmuran milik desa yang bisa dilelang untuk mereka yang tidak memiliki tanah dan bergilir sehingga bisa lebih merata.

Akses penguasaan tanah yang juga dapat dilakukan petani adalah gadai. Gadai ditemukan di 2 desa, yaitu Awolagading dan Sidomulyo. Harga gadai sendiri biasanya dipengaruhi oleh kesuburan tanah dan kebutuhan pemilik tanah, semakin mendesak pemilik tanah membutuhkan uang, harga gadainya pun akan semakin rendah. Oleh karena itu, sistem gadai pada umumnya membutuhkan modal yang lebih banyak dibanding sewa sehingga gadai bukan pilihan untuk orang miskin.

Hubungan antara penggarap dan pemilik lebih banyak menguntungkan pemilik tanah karena sebagian resiko seperti gagal panen dialihkan kepada petani penggarap seperti yang diterapkan pada sistem bagi hasil, sewa, dan gadai. Selain itu, petani penggarap tidak memiliki posisi tawar dengan pemilik tanah, atau kepastian akses tanah untuk kedepan. Misalnya salah satu kasus yang terjadi di Wele, yaitu seorang penggarap murni kehilangan 80% tanah garapannya karena si pemilik tanah ingin menjual sebagian tanahnya. Petani penggarap tersebut tidak memiliki posisi tawar sehingga hanya mengikuti keputusan si pemilik. Kehilangan tanah garapan berarti kehilangan pendapatan, sehingga dirinya harus mencari pekerjaan lain dalam waktu yang cepat.

Pada prinsipnya, masalah kepemilikan tanah yang berlebihan sebenarnya dapat ditanggulangi pada tingkat lokal tanpa mengandalkan pelaksanaan UUPA yang memerlukan birokrasi yang besar. Hal ini dibuktikan bahwa sudah ada kesepakatan informal dari antara warga dan tokoh masyarakat di Sidomulyo untuk membatasi orang untuk menjual tanah kepada seorang petani kaya yang telah banyak memiliki lahan di Sidomulyo. Kesepakatan informal ini sebaiknya juga didukung menjadi keputusan yang lebih kuat dalam tingkat lokal.

#### *Hubungan antara Sektor Pertanian dan Bukan-Pertanian*

Struktur agraris di atas mempengaruhi akses terhadap total pendapatan RTP pada 12 desa penelitian. Sebagian besar struktur agraris tersebut sudah berubah jika dibandingkan dengan 'pola klasik', yaitu pendapatan bukan-pertanian berbanding lurus dengan penguasaan tanah. Saat ini pola akumulasi modal sudah berubah, jika dulu struktur ekonomi tidak merata karena dahulu terkait dengan tanah, namun saat ini sudah bervariasi, karena dinamika pekerjaan sektor bukan-pertanian. Misalnya yang terjadi di Sidomulyo, yaitu total pendapatan buruh tani tak bertanah di Sidomulyo justru lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan kecil karena lebih banyak pekerjaan serabutan di sektor bukan-pertanian.

Meskipun begitu, masih terdapat desa penelitian yang memiliki struktur agraris klasik, yaitu Kedawung dan Harjodowo. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan yang utama bagi warga desa-desa ini. Pilihan pekerjaan bukan-pertaniannya lebih sedikit, petani kecil dan buruh tani tak bertanah sangat bergantung pada sektor pertanian karena keterbatasan modal yang mereka miliki.

Selain pola-pola struktur agraris di atas, terdapat tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan yang menunjukkan monopoli pendapatan oleh petani pemilik modal. Mereka lebih banyak berasal dari keluarga petani kaya pemilik lahan tanah luas (*landlord*), para datuk dan keturunan bangsawan, serta PNS. Mereka juga melakukan akumulasi modal di luar sektor pertanian padi seperti perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Selain itu, pilihan pekerjaan di luar bukan-pertanian desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan kurang beragam daripada di desa-desa di Jawa. Jikapun ada, yang banyak dilakukan adalah menjadi buruh sektor bukan-pertanian dengan imbalan yang relatif rendah.

### III. 2. Institusi Pertanian<sup>21</sup>

Penelitian ini menemukan banyak implementasi kebijakan institusional yang belum terealisasi dengan baik pada tingkat desa sehingga menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk dapat mencapai hasil panen/produktivitas yang diharapkan untuk mendukung efisiensi sosial. Implementasi kebijakan institusional bentukan pemerintah seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), atau misalnya lembaga pengaturan air masih lemah.

Lembaga yang dibentuk pemerintah cenderung dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka, sehingga tidak berfungsi. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) tidak berjalan, Poktan (Kelompok Tani) yang berjalan relatif sedikit karena ada hubungan keluarga (relasi kedekatan). Akses terhadap subsidi dan bantuan pertanian padi banyak mengarah pada elit desa yang aktif dalam Poktan dan Gapoktan karena (1) berkuasa/berpengaruh di desa, (2) jejaring luas, (3) memegang peran penting dalam hulu – hilir pertanian padi.

Dukungan institusi pertanian di desa baik bentukan pemerintah maupun masyarakat lemah dalam mendorong kesejahteraan petani kecil. Pengejawantahan aturan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), peran kelompok tani, dan pilihan tindakan bersama aktor pertanian di desa cenderung tidak berpihak pada petani kecil. Di satu sisi, organisasi bentukan masyarakat memiliki daya dukung terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil walau dalam lingkup yang relatif kecil. Tanpa dukungan pemerintah daya hidup institusi ini cenderung mengalami stagnansi dan meredup. Begitupula dengan peran PPL, yang juga berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi manfaat bantuan pemerintah.

Ditemukan beberapa kasus Poktan dan Gapoktan belum mampu mengalokasikan bantuan kepada para petani, penerima manfaat sebatas pada ketua kerabat dekat maupun tetangga dari pengurus.

---

<sup>21</sup> Untuk sebagian informasi yang lebih banyak mengenai sub bab institusi pertanian dapat melihat laporan Institusi Pertanian dan Kesejahteraan Petani dalam Konteks Efisiensi Sosial (Handiko dan Pithaloka, 2014).

Misalnya adalah Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang menjadi sumber akumulasi modal bagi Ketua Gapoktan atau subsidi sarana produksi di beberapa desa penelitian. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu jenis bantuan dari pemerintah yang diterima hampir seluruh petani. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) menjadi acuan pembagian pupuk bersubsidi melalui Gapoktan dan toko saprodi yang ditunjuk oleh PPL dan Gapoktan. RDKK di desa penelitian Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada kontrol yang jelas oleh PPL terhadap kebutuhan pupuk subsidi. Petani bisa langsung membeli di banyak toko saprodi karena lingkup toko yang ditunjuk saling tumpang tindih satu dengan lainnya.

Tingkat kedekatan dengan pengurus menjadi salah satu faktor utama dalam distribusi manfaat karena prioritas pembagian bantuan berdasarkan pada tingkat kedekatan antara ketua, pengurus, dan anggota Poktan lainnya. Bantuan yang turun ke desa pun, kebanyakan tidak sesuai dengan kebutuhan petani dikarenakan dalam proses pengajuan proposal yang menjadi syarat turunnya bantuan didasarkan pada asumsi PPL dan pengurus kelompok yang terlibat. Distribusi saprodi melalui Poktan dan Gapoktan masih terbatas pada anggota yang memiliki kedekatan dengan pengurus dan ketua. Distribusi alat pertanian padi seperti mesin tani, pupuk, pestisida dan benih subsidi merupakan kasus yang sering hanya tersebar pada anggota atau pihak yang memiliki kedekatan dengan ketua dan pengurus.

Institusi penyuluhan seperti PPL pun, belum bekerja secara maksimal. Pendekatan penyuluhan yang berpusat di Poktan menyebabkan informasi berputar di ketua dan pengurus Poktan, petani tidak mengetahui mengenai informasi kecuali disampaikan oleh ketua Poktan. Kelompok tani kemudian menjadi wadah untuk dapat mengakses program pemerintah karena PPL hanya memberikan informasi terkait dengan bantuan dari pemerintah yang bisa diakses oleh Poktan. Kurangnya peran dari PPL dalam membantu petani untuk banyak dikeluhkan petani, misalnya peran dalam pemberantasan hama di salah satu desa di Jawa Barat.

### **Hubungan Antar Aktor Dalam Pertanian Padi Serta Kegiatan Hulu – Hilir**

Selain organisasi di atas, penelitian ini menemukan hubungan ketergantungan petani dengan sumber daya eksternal untuk melakukan re-produksi sosial, dan hubungan pertukarannya cenderung tidak menguntungkan bagi petani kecil.

Petani semakin tergantung dengan input – input eksternal (industri) seperti mesin traktor, bahan bakar, pupuk kimia, pestisida kimia dan herbisida kimia. Hal ini mengkhawatirkan dari sisi keberlanjutan. Selain itu, penguasaan kegiatan hulu dan hilir usahatani padi seperti penyediaan saprodi, pengolahan & pemasaran hasil cenderung dikuasai oleh sejumlah elit desa yang sebagian merupakan pemilik tanah luas dan sering memiliki kedudukan dalam struktur kelembagaan desa. Petani mengalami ketergantungan kepada aktor-aktor yang menguasai penyediaan saprodi, pemilik tanah besar, tengkulak, dengan cara hutang. Sebagian besar petani di 12 desa penelitian melakukan peminjaman bibit, mengakses pupuk, dan pemberantas hama dengan sistem hutang. Karena ketergantungan tersebut dan tidak ada wadah untuk petani, maka nilai lebih keluar dari petani ke aktor lain. Wadah tersebut seidealnya untuk menahan nilai lebih tetap diterima oleh petani.

Sebagai contoh sebagian petani sempit dan petani tidak bertanah di desa penelitian di Jawa Tengah tergantung dengan tengkulak padi/tukang tempur untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, membeli input pertanian, atau untuk membayar pompa. Mereka berhutang kepada tengkulak padi

karena modal banyak dialokasikan untuk sewa tanah dan biaya pompa, terutama mereka yang menyewa di tanah yang jauh dari sumber daya air. Petani bisa membayar hutangnya dengan uang atau beras setelah panen, menggunakan uang dengan bunga 10 - 20%, atau harus menjual gabah kepada tukang tempur dengan harga yang sudah ditentukan, dan biasanya lebih murah daripada harga gabah di pasaran. Rantai hutang mengakibatkan menyempitnya ruang pilihan bagi petani untuk memilih menjual padinya kepada pihak yang lebih menguntungkan petani. Contoh lainnya ada di desa penelitian di Sulawesi Selatan, yaitu petani penggarap yang diharuskan membeli sarana produksi dan pestisida kepada seorang kaya, dan pembayarannya lebih diutamakan berhutang sampai waktu panen. Hal ini dilakukan agar petani bisa terus menjual gabah kepadanya dan memberikan bunga terhadap sarana produksi yang dibeli petani kepadanya.

Adapula kasus lain di salah satu desa penelitian di Sulawesi Selatan, yaitu Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) yang juga memiliki pekerjaan sebagai tengkulak dan pemilik warung memiliki strategi memberikan *panjer* (hutang) kepada petani agar petani menjual gabahnya kepada dirinya. Jika ada petani yang mengalami gagal panen, maka tetap akan diberikan pinjaman sampai batas waktu 2 kali peminjaman. Untuk *panjer* gabah, dirinya tidak memberikan bunga karena dengan hutang saja sudah dia gunakan sebagai cara agar petani tidak lari dan terus menjual gabah kepadanya. Dia juga memberikan hutang di warung kebutuhan sehari-hari milik keluarganya dengan sistem bunga yang bisa dibayar setelah panen. Jika ada petani yang tidak membayar akibat gagal panen, maka bunganya akan naik setiap musim sampai si petani mampu membayar.

Contoh lain ketergantungan petani dengan aktor - aktor penguasa hulu hilir pertanian padi ada di salah satu desa di Jawa Barat. Selama 2 tahun ini petani menjual padinya kepada calo yang memiliki jaringan kuat dengan tengkulak besar dan mendapatkan uang hanya dengan memberikan informasi daerah yang akan panen. Calo menganggap posisinya adalah sebagai "pembantu petani". Sementara dari sisi petani, mereka harus mau menjual padi melalui calo dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Petani tidak berani untuk menolak keberadaan calo karena mereka yang memegang posisi penting seperti kepala dusun dan PNS. Calo menggunakan kekuatan premanisme kepada petani yang terlihat menjual langsung kepada tengkulak, yaitu dengan membuat keributan seperti memarahi petani. Adapula kasus petani yang menjual langsung ke tengkulak, kemudian petani tersebut kehilangan traktor tangannya. Hal ini menimbulkan rahasia umum bahwa petani yang berani menjual ke tengkulak, maka akan mendapatkan teror dari calo - calo tersebut.

Dari gambaran di atas dapat terlihat bahwa dengan ketergantungan dalam bentuk hutang, teror dari aktor penguasa hulu hilir pertanian, maupun paksaan untuk menggunakan saprodi tertentu, lebih sering merugikan petani kecil. Lumbung atau pemasaran bersama yang sudah terwujud dengan baik sebagai alternatif pemasaran yang lebih adil sebenarnya sudah terwujud dalam level Rukun Tetangga (RT) di Sidomulyo, dan hal seperti ini penting untuk ditingkatkan agar petani yang mendapatkan manfaat lebih banyak.

### III. 3. HASIL PANEN

*Sistem pertanian padi berdasarkan usahatani skala-kecil mampu meraih tingkat produksi/ha yang cukup tinggi jauh lebih tinggi dari pertanian padi industrial skala-besar (rice estate)<sup>22</sup>. Melihat hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh petani kecil, tingkat produksi usahatani skala kecil secara potensial bisa jauh lebih tinggi lagi. Usahatani padi yang sempit pun (sampai dibawah 0.25 ha) bisa mencapai produktivitas (per ha) yang tidak kalah dengan usahatani padi yang lebih luas (malah ada indikasi sering lebih tinggi).*

Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana produktivitas lahan pada masing-masing desa penelitian? faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas lahan? mengapa produktivitas pada beberapa desa belum mencapai kondisi produktivitas normal atau mencapai kondisi produktivitas yang lebih tinggi?

### **Hasil Panen dan Produktivitas**

Menurut pengakuan petani (FGD) dan PPL yang diwawancarai, produktivitas pada jenis sawah irigasi biasanya berkisar antara 5-9 ton/ha pada musim kemarau dan 5, 7- 9,8 ton/ha pada musim penghujan. Sementara untuk jenis sawah bukan-irigasi berkisar antara 3-6 ton/ha. Pada 12 desa penelitian hampir semua desa dengan jenis sawah irigasi memiliki produktivitas normal paling rendah adalah 5 ton/ha, sedangkan produktivitas tertinggi mencapai 9,8 ton/ha.

Produktivitas tertinggi sawah irigasi terdapat di Harjodowo. Hal ini dikarenakan sawah Harjodowo dikelola oleh petani luasan relatif kecil dan tersebar dengan luasan rata-rata 1400 m<sup>2</sup>. Pengelolaan sawah yang relatif kecil membuat petani dapat lebih fokus/intensif untuk mengontrol keadaan sawahnya. Selain itu, pekerjaan di sektor bukan-pertanian padi sangat terbatas. Ditambah dengan luasan total sawah di Harjodowo juga relatif kecil, sehingga ketersediaan air mendukung pola tanam serempak, dan petani menggunakan bibit unggul.

Produktivitas sawah tadah hujan yang tinggi terdapat di Cibalongsari. Tingginya produktivitas sawah tadah hujan di Cibalongsari karena cukupnya ketersediaan air dari sumur bor buatan. Adapula besarnya kepedulian petani dalam menggarap sawah, yaitu hampir setiap tahapan pertanian padi selalu dilakukan oleh petani tersebut, kecuali pada tahapan tanam.

Sementara itu, hasil wawancara dengan sampel 30 petani di masing-masing desa memperlihatkan hasil panen musim hujan 2012/13 dan musim kemarau 2013, umumnya sedikit jauh di bawah hasil biasa (lihat Lampiran Tabel 3. 1 dan Tabel 3.2). Di beberapa desa, hasil per hektar pada musim kemarau 2013 dan musim penghujan 2012-13 jatuh dibawah 5,0 ton (gabah kering panen). Bahkan ada hasil panen di beberapa desa yang jauh dibawah 5,0 ton, misalnya Cibalongsari, Kedawung, Awolagading, dan Sidomulyo (irigasi) dan Ceppaga (sawah bukan-irigasi). Sebagian besar penurunan hasil panen dan gagal panen disebabkan oleh serangan hama.

---

<sup>22</sup>di Ketapang hasil baru mencapai 2 ton/ha, sumber informasi diperoleh dari <http://www.investor.co.id/agribusiness/dahlan-iskan-food-estate-ketapang-belum-maksimal/71535>)

Hasil pengolahan data produktivitas menurut luas usahatani 12 desa penelitian (Tabel dan Grafik 3.1, 3.2 dan 3.3)<sup>23</sup> menunjukkan pada umumnya luasan tanah dibawah 0,5 ha memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan luasan tanah diatas 0,5 ha, kecuali di Cibalongsari, Mulyasari dan Wele<sup>24</sup>. Hal ini dikarenakan semakin kecil luasan tanah maka semakin mudah untuk mengurus dan mengontrolnya. Selain itu, pekerjaan pada setiap tahapan banyak dilakukan oleh petani sendiri dan petani lebih fokus untuk mengurus sawahnya sendiri.

Hasil pengolahan data keseluruhan 12 desa penelitian yang di bagi ke dalam empat kategori luas lahan yang diusahakan, yaitu > 2 ha, 1-2 ha, 0,25-0,99 ha dan < 0,25 ha menunjukkan hasil yang bervariasi.<sup>25</sup> Luas tanah di bawah 0,25 ha menunjukkan produktivitas yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa luas tanah yang sempit, bahkan di bawah 0, 25 ha tidak kalah dengan luas tanah yang lebih luas. Untuk semua golongan tanah di bawah 2 ha, luas usahatani dan produktivitas/ha berbanding balik, sedangkan hanya luas usahatani 2 ha ke atas yang bisa mendekati tingkat produktivitas usahatani sempit.

Pengolahan data produktivitas menurut status penguasaan tanah, menunjukkan hasil yang bervariasi.<sup>26</sup> Data ini mendukung kesimpulan bahwa status penguasaan tidak banyak berpengaruh terhadap produktivitas; tidak ada indikasi bahwa status petani penggarap bagi-hasil (pemaro) memiliki dampak negatif terhadap produktivitas. Hal ini dikarenakan intensitas petani dalam mengelola tanah justru meningkatkan produktivitas, bukan hanya tergantung pada hak kepemilikan tanah.<sup>27</sup>

Terdapat hambatan – hambatan yang mempengaruhi produktivitas misalnya pengairan, hama dan penyakit tanaman. Meskipun begitu, terdapat faktor lain yaitu kepedulian dan intensitas petani dalam mengelola tanah. Temuan lainnya adalah produktivitas rata-rata 12 desa penelitian, cenderung tinggi pada desa yang memiliki pola tanam serempak dan ketersediaan air yang memadai. Artinya, pengorganisasian sistem produksi pertanian padi yang baik akan mendukung produktivitas yang tinggi pula.

#### III.4 HAMBATAN YANG DIHADAPI PETANI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI

Petani menghadapi banyak hambatan dalam mengelola sawah untuk mencapai produktivitas normal atau bahkan meningkatkan produktivitas lebih tinggi dari hasil normal. Bagian ini akan memperlihatkan apa saja hambatan yang dialami, bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi

---

<sup>23</sup> Kecilnya sampel petani di masing-masing desa penelitian tidak memungkinkan analisis lebih rinci (misalnya dengan 4 atau 5 kategori luas uasahatani) karena banyak sel yang isinya terlalu kecil. Maka untuk keperluan ini, petani sampel dibagi kedalam dua kategori bsear saja, yaitu yang dibawah dan yang diatas 0.5 ha.

<sup>24</sup> 9 dari 12 desa penelitian, produktivitas sawah dengan luas < 0,5 ha memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan > 0,5 ha

<sup>25</sup> Lihat tabel 3.3 pada lampiran

<sup>26</sup> Lihat tabel 3.4, 3.5 dan 3.6

<sup>27</sup> Peluso dan Ribot (2003: 153-4)



produktivitas pada masing-masing desa, dan cara yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

### *Serangan Hama dan Penyakit Tanaman*

Di beberapa desa, hasil per hektar pada musim kemarau 2013 dan musim penghujan 2012-2013 jatuh dibawah 5.0 ton. (lihat Sidomulyo, Cibalongsari, Kedawung, Pincengpute, dan Ceppaga)<sup>28</sup>. Sebagian besar penurunan hasil panen atau gagal panen disebabkan oleh serangan hama, Kebanyakan hama yang menyerang petani – petani di seluruh lokasi penelitian adalah penggerek batang (sundep), tikus, wereng, dan keong mas. Masalah hama sebenarnya sudah menjadi perhatian lama dan dianggap sebagai ancaman penurunan produksi padi di Indonesia dan membutuhkan pengendalian hama yang terpadu.<sup>29</sup> Salah satu alasan mengapa terjadi serangan hama yang tinggi adalah menurunnya sistem tanam serempak di 12 lokasi penelitian.<sup>30</sup> Pada desa-desa dengan pola tanam tidak serempak cenderung terlihat penurunan hasil panen. Para petani baik dengan luasan tanah besar atau kecil mengaku mengalami penurunan hasil panen. Bahkan Di Cibalongsari dan Kedawung mengalami serangan hama yang paling parah hingga mengalami kondisi gagal panen selama 1-2 tahun terakhir.

Untuk mengatasi hama, petani – petani sangat tergantung dengan pengetahuan yang diberikan oleh penjual saprodi atau PPL yang seringkali didampingi oleh agen yang melakukan promosi pemberantas hama kimia. Sistem penyuluhan mempengaruhi perilaku petani. Misalnya ketika melakukan penyuluhan, PPL yang seharusnya aktif mendukung praktik pertanian berkelanjutan, seringkali menyempatkan sesi promosi merk pemberantas hama tertentu sehingga petani tertarik untuk mencobanya.

Petani di mayoritas desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan melakukan penyemprotan 3 – 4 kali/musim, sedangkan desa – desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami peningkatan frekuensi penyemprotan, yaitu 5 – 7 kali/musim. Frekuensi tertinggi ditemukan pada petani – petani di Kedawung, yaitu 7 – 12 kali/musim. Sebagian besar petani beranggapan racun kimia hasilnya lebih cepat dan praktis, meskipun petani merasa biaya pestisida mahal. Peningkatan frekuensi penyemprotan hama mempengaruhi biaya produksi pertanian padi.<sup>31</sup> Pada desa penelitian di Jawa Barat, penggunaan pestisida cukup besar jika dibandingkan desa-desa penelitian lainnya, baik desa yang terserang hama sangat parah maupun tidak. Dari seluruh responden di Jawa Barat, kisaran biaya penggunaan pestisida antara Rp. 0,47 - 2,38 juta /ha, sedangkan desa-desa di Sulawesi Selatan antara 0,07 - 0,68 juta rupiah. Jawa Tengah paling rendah, yaitu antara 0,02 - 0,40 juta rupiah.

---

<sup>28</sup> Lihat lampiran grafik Produktivitas Hasil Panen (ton gabah/ha), menurut Luas Lahan yang Diusahakan di 12 Desa Penelitian, musim kemarau dan penghujan tahun 2013.

<sup>29</sup> Lihat Press Release IPB (2014) dan artikel James Fox (2014). Kedua tulisan tersebut menunjukkan keseriusan ancaman serangan hama wereng di Jawa dan kurangnya pengetahuan petani mengenai penggunaan pestisida yang justru memperparah serangan wereng.

<sup>30</sup> Penjelasan lebih mengenai tanam serempak dapat dilihat dari bab Teknologi dan Praktik Bertani.

<sup>31</sup> Lihat lampiran tabel Rata-rata Biaya Pestisida Pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013 dan Musim Penghujan 2012-2013

Rata-rata biaya pestisida di desa-desa penelitian di Jawa Barat adalah 0,82 - 1,89 juta/ha, sedangkan untuk desa-desa di Sulawesi Selatan mencapai 0,22-0,40 juta/ha dan Jawa Tengah relatif kecil yaitu 0,17 sampai 0,29 juta/ha. Perbedaan tersebut terjadi karena petani di desa penelitian di Jawa Barat mengatasi hama dengan cara preventif/pencegahan (Karanglayung dan Wanguk) dan represif (Cibalongsari dan Kedaung). Sedangkan kisaran total rata-rata penggunaan pestisida terhadap biaya produksi adalah 1,9 % – 20,4 % (lihat tabel 3.9 dan tabel 3.10).

Petani di desa-desa di Jawa Tengah masih ada yang melakukan pola tanam serempak, atau mengurangi pestisida kimia dan beralih untuk *mengoplos*, misalnya menggunakan lotion anti nyamuk, pemutih pakaian, minyak oli, sampai menggunakan tegangan listrik untuk membasmi hama tikus maupun hama lainnya, yang justru dapat membunuh binatang lain yang menjadi musuh alami hama. Persentase besarnya biaya pestisida pada beberapa desa memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap biaya produksi, selain biaya tenaga kerja.

Untuk melawan hama tikus atau babi, masih terdapat praktik berburu hama bersama di 12 desa penelitian. Misalnya petani Sidomulyo dan Ceppaga masih menggunakan cara gotong royong atau *grobyokan* memburu hama. Grobyokan memburu tikus di Sidomulyo dilakukan oleh petani-petani yang berada di dalam satu hamparan sawah. Sedangkan petani Ceppaga jarang melakukan gotong royong membasmi hama babi, hanya jika ada permintaan dari Pabrik Gula di Ceppaga, karena babi merupakan hama dari perkebunan tebu. Adapula petani di beberapa desa yang secara individual menggunakan predator alami seperti laba – laba untuk memberantas serangga, atau seperti di Sidomulyo yang mendapatkan bantuan pengadaan rumah burung pemakan tikus dari Dinas Pertanian, namun tidak berjalan dengan efektif.

Selain itu, saat ini penggunaan herbisida menggantikan tenaga penyiangan di lokasi penelitian di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh responden di Sulawesi Selatan menggunakan herbisida sebagai pengganti praktik penyiangan. Berbagai merk herbisida dicampur untuk membasmi rumput dan bisa dilakukan oleh 1 orang (biasanya laki-laki). Sedangkan desa – desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menggunakan sewa tenaga kerja penyiangan untuk membasmi tanaman pengganggu dengan mencabut dengan tangan atau sabit, yang dapat menyerap 1 – 5 buruh laki-laki maupun perempuan per hektar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bertani di lokasi penelitian masih jauh dari praktik yang terpadu. Serangan hama selain merupakan faktor yang paling banyak menurunkan hasil panen dan meningkatkan biaya produksi, juga berpengaruh terhadap keberlanjutan tanah karena cara penanggulangan yang dilakukan petani dengan menggunakan pestisida kimia cukup besar sehingga dapat mengancam keberlangsungan tanah pertanian padi.

### *Banjir*

Selama periode 2012-2013, terdapat tiga desa penelitian yang mengalami penurunan hasil panen atau gagal panen karena banjir. Permasalahan banjir disebabkan tidak tersedianya jalur pembuangan air yang mampu mengatur pasokan air dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang besar. Kondisi itu sering membuat petani merugi karena terlambat menanam sehingga terserang hama di musim selanjutnya. Salah satu strategi yang dilakukan petani adalah dengan menggunakan varietas yang cukup tahan pada rendaman air seperti di Karanglayung.

Di Pincengpute dan Wele, terdapat sawah-sawah memiliki resiko banjir karena dekat dengan sungai dan danau. Banjir mengakibatkan gagal panen dan sangat berdampak tanggungan resiko pada petani penggarap karena seluruh biaya produksi yang telah keluar ditanggung oleh penggarap. Pemilik tanah tidak mau menanggung sebagian biaya produksi jika tidak ada hasil yang dibagi pula. Hal tersebut merupakan resiko sebagai penggarap sebagai pihak yang tidak memiliki tanah.

### *Pengairan atau Irigasi*

Masalah pengairan yang dihadapi oleh petani – petani di desa penelitian antara lain adalah infrastruktur pengairan dan kualitas air yang tidak memadai. Hal ini paling dirasakan oleh petani sawah tadah hujan karena sangat bergantung kepada hujan yang saat ini semakin tidak dapat diprediksi, sehingga petani hanya mampu panen satu kali dalam satu tahun. Sebagian petani tadah hujan yang memiliki uang lebih, mengupayakan untuk mengairi sawahnya dengan cara menggunakan pompa air yang dimiliki secara individu atau menyewa pompa sehingga menambah biaya produksi. Air yang mereka ambil berasal dari sungai dan danau terdekat, sampai menyedot air dari irigasi.<sup>32</sup> Di Cibalongsari, air mengalami penurunan kualitas karena limbah perumahan dibuang melalui saluran irigasi. Hal ini membuat hasil produksi di Cibalongsari turun.

Masalah lain terkait pengairan adalah pengaturan pintu air irigasi yang berdampak pada proses penanaman. Pada wilayah yang kondisi airnya diatur dengan ketat, seperti di Sidomulyo dan Harjodowo, sistem tanam serempak harus dilakukan oleh petani karena terkait sistem buka tutup air. Di Sidomulyo, hambatan pengairan terjadi pada musim kemarau, persawahan di Sidomulyo kekurangan air. Lokasi Sidomulyo yang berada di perbatasan antara tengah dan hilir menyebabkan masyarakat Sidomulyo harus menerima giliran pengairan lebih lama daripada desa lain yang berada di hulu maupun tengah. Pada masa-masa tanam padi di musim kemarau, konflik pengairan sawah kerap terjadi dengan petani luar desa. Sebenarnya sudah ada kesepakatan lisan antar pengatur air di masing-masing desa melalui pembagian jadwal bergilir. Meskipun begitu, masih sering terdapat pemilik lahan dari desa lain yang mencuri air dengan cara membuat saluran baru untuk membelokan aliran air atau dengan memasukan pipa ke dalam tanah untuk menyedot air ke lahan mereka. Sedangkan di Awolagading terjadi ketidakselarasan antarpetani dalam satu hamparan karena tanaman palawija.

### *Kelangkaan Input Pertanian Padi atau Penggunaan Merk Pupuk Tertentu*

Pada umumnya di 12 desa penelitian tidak terdapat masalah kekurangan tenaga kerja pertanian, dan jika ketersediaan tenaga kerja lokal tidak mencukupi permintaan, kekurangan buruh dapat diatasi dengan sistim buruh tani dari luar desa yang berpindah-pindah mengikuti musim. Kelangkaan buruh lokal hanya terjadi pada tahapan tanam di Cibalongsari dan Harjodowo.

---

<sup>32</sup> Petani di beberapa desa penelitian mengaku menyedot air dari irigasi meskipun dilarang oleh Dinas Pertanian. Terkadang kepolisian setempat melakukan razia pompa, jika ada yang kedapatan menyedot air dari irigasi, maka pompanya akan ditahan sementara, namun tetap akan dikembalikan setelah mendapatkan teguran.

Pada umumnya petani di 12 desa penelitian sangat tergantung pada sarana produksi hasil industri seperti pupuk, pestisida, dan herbisida di beberapa desa penelitian. Misalnya di beberapa desa penelitian, pupuk sering terlambat datang ke desa karena pengiriman pupuk tergantung pada distributor, dan distributor sendiri juga menunggu pengiriman dari perusahaan pupuk. Masalah lainnya adalah keharusan penggunaan merk pupuk tertentu, terutama sangat terlihat di Pinceng Pute dan Wele.

Sejak tahun 2013, di Wajo dan Bone terdapat aturan dari distributor yang mengharuskan pengecer pupuk membeli pupuk NPK Pelangi ketika membeli Urea. Menurut 2 pengecer resmi pupuk untuk Awolagading, Pincengpute, dan Wele, aturan ini belum dalam bentuk tertulis, namun pihak distributor memberitahu pihak pengecer resmi jika membeli Urea, mereka juga harus membeli NPK Pelangi. Diakui oleh pengecer resmi pupuk dan petani bahwa hal ini memberatkan mereka karena harga untuk NPK Pelangi terbilang tinggi<sup>33</sup>.

Aturan ini sampai juga di petani, petani harus mengambil NPK Pelangi dengan jumlah yang sama dengan pupuk Urea yang petani ambil. Mayoritas petani merasa keberatan akan aturan ini karena mereka sudah lama menggunakan Urea sehingga kurang percaya dengan NPK Pelangi. Akhirnya muncul tanggapan yang berbeda – beda terkait keharusan penggunaan NPK Pelangi. Misalnya ada anggapan bahwa NPK Pelangi tidak cocok untuk tanah berpasir dan kering, sehingga petani tidak melihat perubahan yang berarti dari penggunaan NPK Pelangi. Adapula yang mengira kandungan ureanya di sawah daerah Wajo sudah terlalu tinggi, sehingga membutuhkan kandungan Natrium agar lebih subur. Terdapat pula petani yang merasa bahwa aturan ini hanya permainan dari produsen pupuk dan pemerintah kabupaten. Petani yang berani protes menanyakan kepada pengecer resmi pupuk hanya mendapatkan jawaban “*sudah aturan dari atas (produsen)*”. Sampai penelitian ini selesai, tidak ada informasi yang jelas kepada petani mengenai alasan penggunaan NPK Pelangi. PPL sendiri merasa bingung mengenai aturan resmi dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi keputusan dari distributor.

### **III. 5. Teknologi dan Praktik Bertani**

*Berbagai inovasi teknologi dan teknik bertani padi yang mulai berkembang akhir-akhir ini, tidak berfungsi meningkatkan hasil (malah diantaranya ada yang menurunkan hasil), dan juga melemahkan efisiensi sosial sektor pertanian padi dengan cara (a) mengurangi kesempatan kerja buruh tani, (b) mengalihkan sebagian nilai tambah dari golongan buruh tani yg berjumlah banyak ke kelompok petani tanah luas yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan buruh tani [hambur langsung, Atabela, penggunaan herbisida, combine harvester].*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa penelitian terdapat perubahan penggunaan teknologi dan inovasi dalam tahapan bertani yang memiliki dampak terhadap efisiensi sosial, misalnya teknologi yang tidak tepat guna yang digunakan untuk menghemat waktu dan biaya, namun mengurangi serapan tenaga kerja di pertanian. Hampir dari seluruh perubahan teknologi dan

---

<sup>33</sup> Menurut pengecer resmi pupuk Awolagading, harga Urea dari distributor adalah Rp. 86.250/sak (50 kg), sedangkan harga NPK Pelangi adalah Rp. 111.250 per sak. Untuk harga NPK Pelangi yang sampai di petani bervariasi dari Rp. 115.000 per sak (tunai) atau Rp. 125.000 - Rp. 140.000 per sak (hutang).

inovasi lebih banyak ditemukan di desa – desa penelitian di Sulawesi Selatan. Di bawah akan menjelaskan latar belakang kemunculan teknologi dan inovasi tersebut dan pengaruhnya terhadap efisiensi sosial.

Pada tahapan penanaman, seluruh desa penelitian kecuali yang ada di Sulawesi Selatan, masih menggunakan sistem tanam pindah yang menyerap tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan yang mayoritas berumur di atas 30 tahun. Sedangkan, desa penelitian di Sulawesi Selatan menggunakan 3 sistem tanam, yaitu tanam pindah, hambur langsung, dan menggunakan Atabela (Alat Tanam Benih Langsung). Praktik tanam pindah hanya ditemukan di sawah irigasi dan pompanisasi yang ada di Awolagading dan Pincengpute, meskipun tetap terdapat petani yang menggunakan praktik hambur langsung di tanah irigasinya.

Hambur langsung dilakukan pertama kali oleh petani-petani Bone sejak 6 tahun yang lalu. Hambur langsung merupakan proses penanaman benih yang langsung disebar tanpa disemai dan tidak menggunakan jarak tanam, sehingga tidak beraturan. Hambur langsung menjadi salah satu ancaman bagi Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. Isu utama dari hambur langsung adalah petani tidak menggunakan jarak tanam yang ideal sehingga sinar matahari sulit masuk dan menurunkan produktivitas. Selain itu, karena kerapatan padi, petani sulit untuk memantau hama dan memutuskan menggunakan pestisida dan herbisida lebih banyak. Alasan munculnya hambur langsung adalah (1) mayoritas sawah tadah hujan memiliki produktivitas yang rendah, sehingga agar tidak terlalu rugi, petani mengurangi biaya produksi dan menghemat tenaga serta waktu (lihat tabel Perbandingan Biaya, Tenaga Kerja, dan Waktu Kerja Pada Tahapan Penanaman di 12 Desa Penelitian). Selain itu, (2) ditambah dengan banyaknya pekerjaan bukan-pertanian padi yang menyerap waktu dan tenaga seperti peternak sapi, penebas tebu, pengolah tebu, supir, dan lainnya, membuat petani memilih menghambur benihnya saja. (3) Penguasaan mayoritas sawah di desa penelitian di Sulawesi Selatan lebih luas daripada di Jawa sehingga semakin luas sawah yang dikuasai, maka biaya tanamnya lebih tinggi.

Sudah 1 tahun ini, Dinas Pertanian Wajo memperkenalkan Atabela (Alat Tanam Benih Langsung) untuk mengurangi hambur langsung. Pengenalan Atabela bertujuan agar petani bisa menghemat biaya penanaman namun tetap menggunakan jarak tanam.. Dengan Atabela, petani memang bisa mengurangi biaya penanaman, namun menggantikan kesempatan kerja bagi buruh. Tabel di bawah menggambarkan perbandingan antara sistem tanam yang diterapkan di desa – desa penelitian.

**Tabel 3**

Perbandingan Biaya, Tenaga Kerja, dan Waktu Kerja Pada Tahapan Penanaman di 12 Desa Penelitian (per ha)

<b>Praktik Penanaman</b>	<b>Biaya</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Waktu Kerja</b>
<b>Tanam pindah</b>	Rp. 500.000- 1.000.000 (total rata-rata untuk pengeluaran biaya upah buruh harian atau borongan)	8 – 30 buruh laki – laki dan perempuan	1-3 hari (jika tanah semakin luas, maka pemilik sawah akan menambah pekerja)
<b>Hambur langsung</b>	Rp. 0 (dapat dilakukan sendiri)	1 orang (biasanya laki – laki)	2 – 3 jam/Ha

<b>Atabela</b>	Rp. 150.000 - 200.000 (biaya sewa)	1 - 3 buruh laki - laki	1 hari
----------------	------------------------------------	-------------------------	--------

Sumber: Olahan wawancara mendalam dan survey rumah tangga, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya tanam tertinggi adalah menggunakan tanam pindah, yaitu Rp. 500.000 – 1.000.000/ha dan pemilik tanah luas memiliki strategi untuk menambah buruh tanam agar tidak memakan waktu lama. Sistem tanam pindah menyerap tenaga kerja yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 8 – 30 buruh per ha. Sedangkan biaya, serapan tenaga kerja, dan waktu yang paling sedikit dikeluarkan petani adalah dengan menggunakan hambur langsung. Hambur langsung dapat dilakukan sendiri (yang biasanya laki-laki tanpa ada uang sewa. Kemudian, dengan Atabela petani harus membayar sewa sekitar Rp. 150.000 – 200.000/Ha, dengan 1 – 3 buruh laki-laki. Oleh karena itu, dengan tanam pindah masih ada kesempatan besar bagi buruh (laki-laki dan perempuan) untuk bekerja, sedangkan dengan hambur langsung dan Atabela, kesempatan bekerja untuk buruh menurun, terutama untuk buruh perempuan.

#### *Menurunnya Praktik Tanam Serempak*

Dalam Bahan Ajar Teknologi Budidaya Padi, salah satu prinsip yang perlu ada dalam Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah tanam serempak dengan interval 5 – 7 hari pada minimal 50 Ha atau satu hamparan. Tanam serempak merupakan salah satu strategi petani untuk mengurangi dampak serangan hama, dan penurunan tanam serempak mengakibatkan serangan hama yang tinggi sehingga petani menambah penggunaan pestisida. Penelitian ini menemukan penurunan praktik tanam serempak di 8 diantara 12 desa penelitian. Hanya di Wanguk, Widarapayung Wetan, Sidomulyo dan Harjodowo yang masih menggunakan sistem tanam serempak, mengikuti pengorganisasian irigasi yang baik sehingga petani harus mengikuti waktu tanam yang serempak dalam 1 hamparan, meskipun tidak dalam 1 desa. Kualitas dan kuantitas air yang baik dan merata di setiap hamparan juga mendukung tanam serempak di desa - desa tersebut. Jika ketersediaan tenaga kerja lokal tidak cukup pada saat tanam serempak, dapat diatasi dengan buruh tani dari luar desa yang berpindah-pindah, seperti yang dialami di Harjodowo.

Di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan memiliki kebiasaan *tudang sipulung* (duduk bersama) yang merupakan musyawarah antarpetani dengan Dinas Pertanian untuk saling bertukar pikiran terkait jadwal tanam atau bibit yang akan ditanam, dan lainnya. Menanam serentak masih dilakukan disebagian sawah irigasi Awolagading, Pincengpute, dan Wele karena adanya jadwal pembukaan pintu air. Akan tetapi, sudah 2 tahun terakhir tanam serempak di Awolagading mulai tidak berjalan karena tanaman sela di antara musim padi. Ketika pintu air irigasi dibuka, petani - petani yang menanam kacang kedelai menutup irigasi tersier agar sawahnya tidak terairi. Hal ini mengakibatkan musim tanam padi mundur karena petani yang lainnya harus menunggu sampai kacang kedelai dipanen. Sementara itu, petani sawah tadah hujan menunggu hujan untuk mengolah tanahnya, jika hujan sudah turun selama 3 hari – 1 minggu, maka tanah sudah bisa diolah dan ditanam.

Masalah banjir atau serangan hama dihadapi sebagian petani di Pincengpute, Wele, Karanglayung, Cibalongsari, dan Kedawung. Hal ini menyebabkan sebagian petani yang terkena banjir atau serangan hama harus menunggu sampai bisa menanam lagi. Di Wele, banyak petani yang tidak memiliki traktor tangan dan tidak mampu membayar sewa traktor. Cara yang mereka lakukan adalah membayar dengan tenaga mereka. Mereka dapat mengolah sawah secara gratis dengan cara mengolah sawah si pemilik traktor terlebih dahulu, barulah dapat mengolah tanahnya sendiri.

Selain masalah hama dan banjir, sudah lebih dari 5 tahun petani Karanglayung sengaja menanam terakhir dibanding desa sekitarnya, dengan harapan harga padi mereka bisa lebih tinggi dari harga biasa ketika panen. Sedangkan di Mulyasari, meskipun ada jadwal buka tutup irigasi, pasokan air tidak merata sehingga tidak semua petani mendapatkan air dan harus menunggu. Petani saling menunggu yang akan menanam pertama, karena yang menanam di awal akan terkena serangan hama lebih banyak. Petani yang relatif miskin dan membutuhkan uang adalah yang biasanya menanam lebih awal, sehingga merekalah yang terkena hama lebih banyak daripada petani lainnya.

#### *Combine Harvester : Teknologi Tidak Tepat Guna*

Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari penggunaan combine harvester pada tahapan panen adalah menggantikan kesempatan kerja bagi buruh panen dan semakin terpusatnya arus akumulasi modal kepada petani yang memiliki mesin tersebut, sehingga mengancam pemerataan keuntungan.

Di seluruh desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ceppaga dan Awolagading di Sulawesi Selatan masih menggunakan *power thresher* untuk merontokan padi. Dibandingkan dengan merontokkan padi secara tradisional, penggunaan *power thresher* memang menggantikan tenaga kerja manusia untuk merontokkan padi. Akan tetapi pada kenyataannya, *power thresher* masih menyerap buruh panen yang banyak, yaitu 10 – 30 orang/Ha (laki-laki dan perempuan, baik tua dan muda) dan operator mesin 2 – 4 orang (laki-laki dan perempuan). Akan tetapi, penggunaan *power thresher* khususnya di Cibalongsari sampai saat ini masih bersaing dengan merontokkan padi secara tradisional/*gebot* karena padi tidak cepat rusak, pecah-pecah, dan tahan lama disimpan.

Saat ini di Pincengpute dan Wele, *combine harvester* mulai masuk selama 2 tahun terakhir. Banyak *combine harvester* yang merupakan milik individu dengan cara kredit ke perusahaan penjual mesin dengan harga bervariasi dari Rp. 250.000.000– Rp. 400.000.000 per mesin. Sebagian besar pemilik *combine harvester* adalah petani kaya dan memiliki tanah luas. Di Mulyasari, petani mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian namun rusak ketika baru akan digunakan.

*Combine harvester* banyak digunakan untuk sawah yang luasnya besar, tidak banyak pematang sawah, dan tidak tergenang. Dengan *combine harvester*, arus nilai lebih dari petani yang sebelumnya masuk ke buruh panen yang banyak (dalam bentuk upah) beralih masuk ke pemilik *combine harvester* yang jumlahnya sedikit, yaitu tidak sampai 10 orang di setiap desa penelitian. Salah satu alasan orang membeli *combine harvester* adalah agar dapat memanen sawah lebih luas setiap musimnya, karena dengan *power thresher* terbatas.<sup>34</sup> Alasan lainnya adalah karena upah buruh panen dalam setiap 2 tahun terakhir naik, yaitu tahun ini mencapai Rp. 40.000 – 50.000/hari

---

<sup>34</sup> *Combine harvester* mampu bekerja di tanah 4 Ha/hari, sedangkan *power thresher* hanya mampu bekerja 1,5 Ha/harinya.

(baik untuk laki-laki dan perempuan dewasa, sedangkan untuk anak-anak sekitar Rp. 30.000/hari). Alasan terakhir adalah petani lebih sedikit kehilangan padi dengan *combine harvester* dibandingkan dengan menggunakan *gebot* atau *power thresher*. Meskipun begitu, kualitas padi paling buruk dengan menggunakan *combine harvester*, karena lebih lembab dan padi tidak tahan lama.

*Combine harvester* hanya membutuhkan 7 orang pekerja yang seluruhnya adalah laki-laki, dengan kemampuan panen 4 ha dalam 1 hari, sedangkan panen secara manual dengan buruh panen dan *power thresher* akan memperkerjakan 30 - 120 orang<sup>35</sup> untuk luas yang sama. Penggunaan *combine harvester* dinilai sebagai bentuk efisiensi yaitu panen bisa lebih cepat dan murah, akan tetapi akan mendukung terjadinya polarisasi keuntungan dan pengurangan serapan tenaga kerja panen. Padahal panen menjadi pemasukan yang signifikan bagi orang tak bertanah, petani sempit, baik laki-laki dan perempuan sehingga distribusi keuntungan bisa lebih merata. Inovasi teknologi penting untuk sektor pertanian padi namun jangan sampai justru memperkecil kesempatan kerja dan menggantikan buruh panen. Penggunaan *combine harvester* tidak menjawab masalah, oleh karena itu pembelian dan kemudahan kredit untuk *combine harvester* justru menghambat efisiensi sosial.

### III. 6. PETANI PINTAR, EKSPERIMEN, DAN KEBERLANJUTAN

Penelitian ini menemukan petani-petani pintar yang berani bereksperimen dengan tujuan menghemat biaya produksi, mencegah atau membasmi hama, serta meningkatkan produktivitas. Petani pintar ini mendapatkan pengetahuan dari hasil percobaan sendiri maupun mendapatkan intervensi dari pihak lain seperti pemerintah, NGO, dan universitas. Namun sayangnya, praktik bertani ramah lingkungan yang berkelanjutan masih dilakukan secara individual dan belum menyebar secara kolektif. Pada tahun-tahun mendatang, sistem pertanian pangan di Indonesia (seperti pada Negara-negara lain) mau tidak mau harus makin beralih ke pola yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perlu ada penelitian lebih lanjut dan rumusan solusi yang tepat terkait pertanian padi yang ramah lingkungan. Bagian ini akan memperlihatkan terbentuknya petani pintar dan alasan penyebarannya tidak meluas di desa.

Salah satu contoh keberadaan petani pintar ada di desa Karang Layung dan Wanguk, yang merupakan alumni petani Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang pernah diselenggarakan sekitar tahun 2000-an. Program kelompok tani dan IPPHTI di dua desa ini adalah SLPT (Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman) dan KPCH (Klub Pengukur Curah Hujan). Keduanya merupakan program kolaboratif antara IPPHTI dan Universitas Indonesia yang dilakukan di tahun 2008.

Program yang masuk ke Karang Layung dan Wanguk berusaha menanam kebiasaan petani yang mengikuti program untuk mencatat ongkos produksi, serangan hama, hasil panen, dan lainnya. Dengan pencatatan, petani bisa lebih bereksperimen (*on farm research*) dan munculnya kemampuan petani untuk menyilangkan padi dengan proses seleksi. Meskipun harga jualnya sama dengan varietas lain, namun benih penyilangan ini lebih tahan hama dan kualitas berasnya lebih

---

<sup>35</sup> Dengan perhitungan menggunakan 30 orang/Ha. Jika panen dilakukan dalam waktu bersamaan, petani cenderung menambah buruh agar panen cepat selesai.



bagus daripada varietas lain. PPL lebih sering memberikan informasi 1 arah dari pemerintah<sup>36</sup>, sedangkan yang sebaiknya diterapkan adalah membangkitkan petani untuk melakukan riset di tanah mereka sendiri agar pengetahuan bisa muncul dari 2 arah.

Sedangkan di Wanguk terdapat tambahan program, yaitu koperasi mandiri. Koperasi mandiri di Wanguk memberikan dampak yaitu sebagian warga mampu bekerja sama menghimpun modal tanpa bantuan pemerintah. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya koperasi mandiri adalah kekecewaan sebagian petani di desa terhadap cara pinjaman PUAP yang dikelola oleh PPL namun tidak disalurkan dengan merata. Dana yang dihimpun adalah dana pribadi mayoritas pengurus dan keluarganya, namun saat ini mulai sudah memiliki anggota di luar keluarga pengurus dan berjalan lebih dari 2 tahun.

Petani-petani pintar ini juga akhirnya memiliki kemampuan lebih dalam mengelola sawah, menggunakan inovasi dan teknologi yang ada. Mereka dapat meningkatkan jejaringnya dengan pihak luar yang mampu membantu kegiatan bertaniya dibandingkan petani kebanyakan di wilayahnya. Kelompok petani ini bisa mengakses bantuan-bantuan pertanian yang selalu masuk melalui mereka, misalnya dana PUAP di Karang Layung digunakan untuk membeli traktor tangan dan *power thresher* oleh salah satu petani pintar yang aktif dan dikelola oleh dirinya sendiri. Sedangkan petani pintar di Wanguk membentuk kelompok tani sendiri yang berbeda dengan kelompok tani lainnya. Mereka sendiri berupaya untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka miliki kepada petani lain dengan cara memberi tahu secara informal, menjual benih lokal dengan harga yang lebih murah dari benih biasanya, serta mengajak petani lain untuk ikut menjadi anggota koperasi mandiri.

Meskipun begitu, praktik-praktik baik seperti di Karang Layung dan Wanguk belum menyebar dengan luas. Petani pintar di Karang Layung dan Wanguk relatif sedikit, misalnya dari 30 anggota Poktan, hanya 2 orang yang benar – benar menerapkan pengendalian hama terpadu. Petani lain tidak mengikuti mengurangi bahan kimia dengan alasan lebih praktis karena sibuk di pekerjaan bukan-pertanian padi. Mereka tetap menggunakan pupuk dan pestisida kimia biarpun biayanya lebih mahal. Dengan pestisida alami, mereka harus menimbun sampah selama beberapa bulan dan ini menyita waktu dan tenaga terhadap sawahnya, ditambah hasil produksi mereka tidak berbeda dengan dengan sawah yang menggunakan pestisida dan pupuk alami.

Selain berasal dari intervensi pihak luar seperti universitas dan NGO, adapula petani pintar yang di desa lainnya yang mencoba praktik baru secara individual. Misalnya petani di Kedawung tidak mencoba bibit baru yang lebih tahan hama karena harganya lebih murah di pasaran. Adapula kepala desa dan ketua Gapoktan Awolagading mencoba menggunakan predator alami untuk mengurangi hama, menggunakan pupuk dari kotoran sapi dan daun kering, meskipun tidak rutin. Mereka mendapatkan pengetahuan karena dekat dengan PPL dan Dinas Pertanian sehingga mencoba praktik yang baru. Petani lain di Awolagading tidak menggunakan pestisida atau pupuk alami, meskipun IRRI masuk di tahun 2008 untuk memberikan pelatihan terkait pupuk dan pestisida alami. Petani mengatakan bahwa menggunakan pupuk alami membutuhkan banyak tenaga dan bahan yang dikumpulkan. Sedangkan pupuk kimia bisa langsung diberikan ke tanaman

---

<sup>36</sup> Lebih lengkapnya dapat melihat Laporan Institusi Pertanian dan Kesejahteraan Petani dalam Konteks Efisiensi Sosial (2014).

dengan takaran yang sudah ditentukan. Selain itu, petani lebih cepat melihat reaksi dari padi yang diberikan pupuk kimia daripada pupuk alami.

Petani skala kecil juga berupaya untuk mengurangi biaya produksi dengan melakukan inovasi dalam praktik – praktik bertani. Salah satunya inovasi lain adalah yang dilakukan oleh petani di Pincengpute dan Wele. Sejak 2013, petani Pincengpute dan Wele menggunakan bahan bakar gas elpiji sejak 2013 untuk menjalankan pompa air milik pribadi. Ide ini muncul dari petani-petani yang mencoba dari kabupaten lain dan mereka belajar dari pengamatan ke sesama petani. Jika dahulu petani Wele dan Pincengpute harus mengeluarkan 5 liter bahan bakar untuk 1 hari mengairi sawahnya (5 liter bensin X Rp. 5.000 = Rp. 25.000), kini dalam satu hari hanya memerlukan 1 tabung gas elpiji ukuran 3 kg dengan harga (subsidi) Rp. 17.000.

### *System of Rice Intensification (SRI) dan Sistem Legowo*

SRI dan Legowo merupakan inovasi jarak tanam yang dianggap dapat meningkatkan produksi panen dengan diikuti praktik – praktik lainnya seperti pemupukan yang seimbang dan lainnya. Teknik SRI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 di Sukamandi, Jawa Barat. Saat ini SRI diperkenalkan oleh Dinas Pertanian melalui program SLPHT dan dipromosikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di dunia pertanian (Setiajje, Sumedi, dan Wardana, 2008). Penerapan SRI dan Legowo juga ditemukan di desa-desa penelitian, namun tidak menyebar secara luas. Dengan menerapkan SRI, petani – petani di Cibalongsari, Kedawung, Mulyasari bersedia menyediakan tanahnya untuk praktik – praktik tersebut mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan bantuan traktor tangan, dan biasanya mereka adalah Ketua Gapoktan dan Ketua Poktan.

Alasan mengapa SRI dan sistem legowo tidak diterima secara luas oleh petani di lokasi penelitian adalah dengan jarak tanam yang jauh dan sedikit bibit, tanaman tumbuh sedikit dan jarang. Hal ini mengakibatkan mudah dimakan oleh binatang sekitar, dan jika terserang hama hasilnya akan menurun sekali karena bibit yang ditanam juga sedikit. Petani yang menerapkan SRI di Cibalongsari, Kedawung, Mulyasari, dan Awolagading (legowo) mengaku bahwa tanaman mereka dimakan oleh bebek, keong, atau sundep sehingga hasilnya buruk. Adapula aliran air yang tidak stabil dan angin kencang membuat tanaman metode SRI menjadi jatuh/baring sehingga tidak akan tumbuh. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan padi akan diganti oleh Dinas Pertanian jika hasil SRI gagal. Hal ini membuat petani hanya menerapkan SRI sebagai salah satu cara untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian seperti traktor tangan. Alasan lainnya tidak meluasnya SRI adalah kerepotan dalam menanamnya. Hal ini dikemukakan petani di Cibalongsari, karena proses penanamannya membutuhkan teknik tertentu dan buruh tanam di desanya tidak mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk menanam dengan metode SRI.

Selain itu, di Widarapayung Wetan juga terdapat dua petani yang menerapkan SRI yang didapatkan dari desa asalnya, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa praktik yang mereka lakukan bernama SRI. Petani lain tidak mengikuti karena dengan jarak yang jauh, padi menjadi lebih mudah terkena angin, air, dan jika terserang hama maka hasilnya semakin sedikit.

Adapula di Mulyasari, bantuan SLPTT untuk SRI tidak disosialisasikan kepada petani, namun bantuan diberikan untuk tanah yang menjadi lokasi SLPTT. Akan tetapi, pelaksanaan SRI tidak sepenuhnya sesuai dengan arahan karena petani tidak percaya implementasinya, misalnya menambahkan tambahan benih padi yang sudah disemai ke dalam 1 lubang.

Praktik – praktik bertani saat ini yang dianggap meningkatkan produktivitas seperti SRI dan sistem legowo, belum menyebar secara luas. Hal ini dikarenakan (1) ketidakyakinan petani akan hasilnya, (2) banyaknya hambatan yang dihadapi jika menggunakan SRI dan sistem legowo seperti serangan hama, angin, air, (3) petani menanggung sendiri jika metode SRI atau legowo mengalami kegagalan, (4) serta buruh tanam tidak mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk menanam dengan metode SRI dan legowo. Hal ini berdampak pada penerapan SRI dan legowo dilakukan segelintir petani aktif, hanya untuk untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

### III.8. FLUKTUASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA SETIAP TAHAPAN PRODUKSI (*PENGGUNAAN TENAGA KERJA, PEREKRUTAN, DAN SISTEM PENGUPAHAN*)

#### **Penggunaan Tenaga Kerja**

Tahapan tanam membutuhkan banyak tenaga kerja karena pada tahapan ini biasanya dilakukan hampir serempak/bersama-sama oleh pemilik lahan. Selain itu, penyelesaian tahapan tanam juga perlu waktu cepat karena bergantung pada ketersediaan air. Kebanyakan tenaga kerja perempuan bekerja pada tahapan ini karena dianggap lebih teliti, lebih terampil, dan hati-hati. Sementara pada tahapan ini jumlah laki-laki yang ikut relatif sedikit, yang bertugas mengangkut benih ketempat tanam. Sedangkan desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan yang menggunakan hambur langsung dan Atabela biasanya dilakukan oleh laki-laki. Meskipun begitu, terdapat juga perempuan yang membantu suaminya disawah, terutama petani kecil untuk mengurangi biaya produksi dengan memaksimalkan tenaga kerja tidak dibayar.

Tahap penanaman di desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah menyerap tenaga kerja 20-30 orang per ha dengan waktu tanam antara 0,5 bulan - 1 bulan. Di Harjodowo, pola tanam relatif serempak berdampak pada kesulitan tenaga kerja, sehingga pemilik tanah *membooking* buruh agar bisa digarap lebih awal atau dengan buruh tanam musiman yang berasal dari desa lain. Sementara desa penelitian di Sulawesi Selatan, penggunaan buruh tandur lebih sedikit karena adanya hambur langsung dan Atabela, yaitu membutuhkan 1-2 orang laki – laki.

Pada tahapan panen untuk desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menyerap tenaga kerja yang tinggi. Pada saat panen, warga yang bekerja pada sektor bukan-pertanian padi turun ke sawah untuk ikut panen. Tahapan panen juga menjadi kesempatan bagi penggarap dengan luasan lahan kecil untuk ikut menjadi buruh panen demi mendapatkan tambahan penghasilan.

Jumlah tenaga kerja bervariasi tergantung sistem panen, jika menggunakan ceblokan baik menyangi maupun tanam<sup>37</sup>, maka jumlah tenaga kerja berkisar 5-20 orang/luasan lahan.

---

<sup>37</sup> Ceblokan adalah sistem dimana buruh tani memperoleh hak memanen pada lahan sawah namun harus membantu pada tahapan menyangi

Sedangkan dengan sistem gorol<sup>38</sup>, maka jumlah buruh tani yang dapat bekerja tidak dibatasi oleh pemilik/penggarap lahan sawah. Kegiatan panen di desa-desa penelitian di Jawa Tengah, bisa melibatkan 8-10 orang/luasan lahan. Keberadaan teknologi seperti mesin perontok (*power thresher*) meningkatkan hasil panen bagi penggarap sawah, selain itu juga tidak menggeser penggunaan tenaga kerja. Bagi buruh tani, keberadaan mesin perontok cukup menguntungkan karena buruh tani dapat bekerja lebih cepat di waktu panen sehingga bisa bekerja di sawah milik orang lain atau bekerja di sektor bukan-pertanian padi. Bagi buruh yang sudah tua, keberadaan mesin perontok sangat membantu karena pekerjaan menjadi tidak terlalu lelah/capek.

Pada tahapan panen di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan, yang masih menggunakan mesin perontok dapat menyerap tenaga kerja 10-30 orang/ha, baik laki-laki dan perempuan. Sementara itu, jika menggunakan *combine harvester* tenaga kerja hanya berjumlah 6-7 orang/ha dan hanya buruh laki-laki. Sebelum masuknya *combine harvester* ke Wele dan Pinceng Pute, banyak perempuan yang berdatangan dari kabupaten sekitar Wajo untuk menjadi buruh panen. Akan tetapi, setelah *combine harvester* masuk, para buruh panen yang bekerja tidak lagi bekerja lagi. Bahkan banyak warung-warung yang dulu tempat *nongkrong* para pekerja terpaksa gulung tikar..

Pada tahapan selain tanam dan panen, seperti mencangkul, memupuk, dan menyemprot, rata-rata petani kecil akan mengelola sawahnya sendiri untuk menghemat biaya produksi. Sedangkan petani besar masih menggunakan buruh bayaran pada setiap tahapan pertanian padi. Penggunaan tenaga kerja pada tahapan ini tidak terlalu banyak, yaitu 1-3 orang saja tergantung dengan luasan lahan dan biasanya dikerjakan dalam waktu 1- 3 hari.

Pada tahapan pengolahan lahan di 12 desa, biasanya menggunakan traktor tangan yang dilakukan secara borongan. Tenaga kerja yang terserap antara 1-2 orang laki-laki/ha. Bahkan di Ceppaga, hampir semua petani memiliki traktor sendiri sehingga tidak memerlukan tenaga kerja banyak, dan yang tidak memiliki bisa meminjam kepada keluarganya.

### **Perekrutan Tenaga Kerja**

Pada setiap tahapan produksi, hampir sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan tanam, menyiangi, dan panen. Dalam merekrut tenaga kerja untuk penanaman, pada umumnya petani akan langsung mendatangi ketua kelompok tanam kecuali di Ceppaga dan Wele. Sedangkan pada tahapan panen, pemilik/penggarap lahan pada umumnya mengajak tetangga, saudara atau memberikan informasi dari satu buruh ke buruh lainnya. Begitu pula untuk tahapan lainnya.

### **Sistem Pengupahan**

Terdapat 3 jenis pengupahan pada 12 desa penelitian, yaitu pengupahan harian, borongan dan bagi hasil dari panen. Pada upah harian, terdapat 2 jenis waktu bekerja yaitu setengah hari (jam 7

---

<sup>38</sup> Sementara sistem gorol adalah sistem dimana buruh tani boleh memanen padi, sistem tersebut terjaid karena pemilik lahan ingin cepat menyelesaikan masa panen.

sampai dengan jam 12 siang), dan harian penuh (jam 7 pagi sampai jam 4-5 sore). Berikut ini merupakan perbandingan upah harian tenaga kerja pada setiap tahapan produksi pertanian padi.

**Tabel 4**  
**Upah Harian Buruh Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Padi pada 12 Desa Penelitian**  
**Tahun 2012-2013**  
**(dalam ribuan rupiah)**

	Jenis Kelamin	Sido mulyo	Harjo dowo	Widara payung	Mulya sari	Awola Gading	Ceppaga	Wele	Pinceng pute	Cibalongsari	Kedawung	Karang Layung	Wanguk
<b>1/2 hari</b>	L	n.a	n.a	25	25	n.a	n.a	n.a	n.a	30-40	30-40	30-35	25-35
	P	n.a	n.a	25	25	n.a	n.a	n.a	n.a	30-40	25-30	n.a	n.a
<b>Harian</b>	L	25-30	25-30	40-50	40-50	40-50	35-50	35-50	40-50	60-70	50-60	60	60
	P	25-30	25-30	30-50	40-50	n.a	35-50	40-50	40-50	n.a	n.a	n.a	60

*Sumber: Pengolahan Data Survei Rumah Tangga dan Wawancara Mendalam*

Tabel diatas memperlihatkan upah yang diterima oleh buruh tani pada setiap tahapan pekerjaan. Upah harian pada umumnya diterima pada tahapan pekerjaan cangkul, memupuk, menyemprot dan menyangi. Pengecualian ada pada desa-desa di Sulawesi Selatan, tahapan panen juga menggunakan upah harian. Upah harian relatif hampir sama baik untuk buruh laki-laki dan perempuan.

Upah harian relatif hampir sama kecuali di Cibalongsari, Sidomulyo dan Harjodowo. Di Cibalongsari, upah buruh tani lebih besar dari desa-desa penelitian lainnya. Keadaan tersebut disebabkan karena (1) jumlah buruh tani di Cibalongsari relatif sedikit, (2) pilihan-pilihan sektor pekerjaan diluar pertanian juga besar karena lokasi dekat dengan sentra industri, sehingga para pemilik/penggarap tanah menyesuaikan upah buruh tani agar mau bekerja di sektor pertanian padi. Sedangkan upah buruh di Sidomulyo dan Harjodowo relatif lebih rendah dari desa lainnya karena upah buruh di sektor-sektor bukan-pertanian padi di dalam desa juga relatif hampir sama.

Pada desa-desa penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, upah tanam dan panen relatif bervariasi. Hal itu dikarenakan sistem pengupahan pada tahapan tanam adalah sistem borongan, sedangkan pada tahapan panen berdasarkan bagi hasil panen. Semakin sedikit yang ikut menanam, maka upah yang diterima semakin besar. Sedangkan semakin banyak buruh yang ikut menanam, maka semakin kecil upah yang diterima per luasan lahan yang dikerjakan.

Upah pada sistem tanam sangat tergantung pada banyaknya buruh yang mengerjakan karena pada umumnya biaya borongan tanam akan dibagikan secara merata kepada buruh berdasarkan luasan lahan tertentu yang dikerjakan. Kisaran rata-rata pendapatan buruh tanam di desa-desa Jawa Barat adalah 30.000-60.000/hari kecuali di Wanguk, yaitu antara 15.000- 25.000/hari. Keadaan tersebut terjadi karena di Wanguk menggunakan sistem buruh ceblok-tanam, artinya buruh yang ikut panen adalah merek ayang ikut menanam. Perubahan ini terjadi seiring dengan maraknya sistem sewa di Wanguk, sehingga para penyewa lahan berstrategi untuk menurunkan biaya produksi dengan mengurangi biaya tanam. Sedangkan pada desa-desa penelitian di Jawa Tengah, pendapatan dari tahapan tanam yang diperoleh buruh antara 25.000-30.000/hari.

Upah pada tahapan panen bergantung pada banyaknya (1) buruh yang bekerja dan (2) hasil produksi. Artinya semakin besar hasil panen, maka semakin besar juga bawon (gabah) yang diterima. Upah yang diperoleh buruh tani berupa gabah di 12 desa bervariasi dari 1:3 (untuk buruh panen dari keluarga) hingga 1:9 (untuk buruh tani yang lahannya dimiliki oleh orang luar desa).

Tahapan panen mengalami perubahan teknologi. Saat ini di 12 desa penelitian, panen yang sebelumnya dilakukan secara manual sudah digantikan dengan mesin perontok. Pada desa-desa penelitian di Jawa Barat, penggunaan mesin perontok tidak mengurangi jumlah buruh panen. Pengurangan hanya terjadi pada jumlah bagi hasil dari panen, jika sebelumnya 1:5, namun saat ini menjadi 1:6 atau 1:7. Keadaan tersebut ditemukan di desa-desa penelitian di Jawa, sedangkan di Sulawesi Selatan, produktivitas lahan pada umumnya tidak mempengaruhi pendapatan buruh tani karena buruh panen dibayar harian. Rata-rata buruh panen bisa mendapatkan upah antara Rp. 50.000-150.000/hari (Jawa Barat dan Jawa Tengah) dan 40.000-70.000/hari (Sulawesi Selatan). Upah yang diterima oleh buruh panen bisa berbentuk uang atau gabah kering panen.

Besarnya upah pada tahapan panen menciptakan salah satu ketergantungan buruh pada tahapan ini, karena banyak buruh yang membayar hutang pada masa panen. Upah panen merupakan salah satu sarana distribusi pendapatan dari pemilik tanah luas kepada pemilik tanah kecil dan buruh tani. Berikut merupakan perbandingan upah buruh panen dibandingkan dengan upah sektor bukan-pertanian/usaha bermodal relatif kecil.

**Tabel 5**

**Perbandingan Upah Buruh Panen dengan Upah Non Farm /Usaha Bermodal Relatif Kecil per hari Tahun 2012-2013  
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Pekerjaan	Pertanian Padi		Bukan-pertanian Padi		
	Laki-Laki	Perempuan	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
<b>Buruh panen</b>	50-150	50-150	Buruh bangunan	70-100	
			Buruh konveksi	50-100	
			Buruh tenun		1 - 8
			Kernet	60-70	
			Menjaga toko		20
			Pemilik warung makanan ringan		25

*Sumber: Pengolahan Data Survei Rumah Tangga dan Wawancara Mendalam, 2013.*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa di 12 desa penelitian, upah buruh panen pertanian padi, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa upah buruh di sektor bukan-pertanian padi ataupun usaha bermodal kecil (misalnya warung makanan ringan). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian padi masih memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan khususnya masyarakat miskin pada 12 desa penelitian, khususnya tahapan panen. Pada umumnya biaya panen merupakan biaya paling besar dari komponen tenaga kerja maupun biaya lainnya. Jika produktivitas lahannya tinggi, maka upah buruh panen yang diterima juga akan tinggi, kecuali di Ceppaga, Awolagading dan Picengpute karena pada desa-desa ini upah panen dibayar harian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian padi masih menyediakan kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat di desa, Keadaan tersebut didukung oleh penggunaan tenaga kerja pada tiap tahapan terutama pada tahapan tanam dan panen. Sektor pertanian padi juga memberikan upah yang relatif sama dengan sektor bukan-pertanian lainnya. Bahkan pada tahapan panen justru memberikan upah yang relatif lebih besar daripada pendapatan buruh di sektor bukan-pertanian padi, hanya saja waktu untuk bekerja pada sektor ini relatif singkat dan berkala.



### III. 9. KEBERLANJUTAN PERTANIAN SKALA KECIL<sup>39</sup>

Terdapat anggapan umum bahwa pertanian mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya keengganan pemuda/I desa untuk bertani. Akan tetapi anggapan umum ini perlu dikritisi. Penelitian ini menemukan pemuda/I desa yang masih tertarik untuk bertani, namun menghadapi masalah seperti akses tanah pertanian dan perbedaan pendapatan pada sektor pertanian padi dan sektor bukan-pertanian padi. Keadaan ini ikut mendorong mereka untuk bermigrasi keluar desa. Pola migrasi orang muda perdesaan adalah pola lama dan seringkali bersifat sementara. Kadang-kadang para migran muda justru bercita-cita untuk menabung supaya nantinya bisa membeli atau menyewa tanah pertanian di desa asal.

Meskipun anak muda akan kembali ke dunia pertanian atau kembali ke desa, hal ini bukan solusi terbaik karena tidak bisa menjadi bantalan tunggal. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa pertanian adalah sektor penting dan mengembangkan pertanian artinya mengembangkan lapangan kerja. Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi ketenagakerjaan orang muda perdesaan di Indonesia. Perbandingan pendapatan antara pertanian padi dan bukan-pertanian (baik di desa dan di luar desa) dan mobilitas tenaga kerja

#### **Kondisi Ketenagakerjaan Orang Muda Perdesaan di Indonesia**

Berdasarkan analisis terbaru UCW, secara keseluruhan hampir satu dari lima (19%) orang muda dalam angkatan kerja Indonesia menganggur. Sementara pengangguran orang muda di perkotaan (21%) sekitar seperempat lebih tinggi daripada di perdesaan (16%). Perlu dicatat juga bahwa 20% di kota juga berasal dari perdesaan. Tingkat pengangguran untuk orang muda perdesaan masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan sektor pertanian - atau lebih tepatnya ekonomi perdesaan- untuk menyerap angkatan kerja muda di perdesaan.

Banyak diantara orang muda yang menganggur telah mengalami masa pengangguran panjang (12 bulan atau lebih), di mana 51% dari semua berada di perkotaan, 53% di perdesaan; 53% adalah laki-laki muda, 50% adalah perempuan muda; 63% pengangguran usia 20-24 dan 40% dari mereka berusia 15-19.<sup>40</sup> Sementara itu, dunia pendidikan justru memberikan ironi tersendiri terhadap partisipasi angkatan kerja di sektor pertanian. Kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka partisipasi untuk bekerja sektor pertanian akan semakin rendah atau menurun.

#### ***Orang Muda Tanpa Akses Kepemilikan Tanah***

Pada penelitian ini, akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor yang dianggap memberikan pengaruh terhadap ketertarikan orang muda untuk tetap bekerja di bidang pertanian atau tidak. Orang muda melihat kepemilikan tanah hal yang sangat penting dalam menentukan minat mereka untuk bekerja menjadi petani. Pada penelitian ini pemuda yang orangtuanya merupakan pemilik sawah, dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus menunggu lama sampai mendapatkan warisan sawah dari orangtua. Orang muda terutama pemuda yang masih menunggu warisan orangtua biasanya ikut kerja membantu orangtua mereka terlebih dahulu di sawah, atau bermigrasi

---

<sup>39</sup> Informasi lebih lengkap dapat melihat laporan Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian Di Perdesaan (Herawati dan Nugraha, 2014)

<sup>40</sup> UCW (2012) p. 46

keluar desa bahkan keluar negeri. Sampai ketika mereka mendapatkan hak sepenuhnya akan sawah, barulah mereka akan kembali ke desa.

Orang muda yang berasal dari kategori penguasaan sempit, umumnya akan memperoleh akses untuk mengelola sawah setelah orang tuanya meninggal atau fisik orangtua sudah tidak kuat untuk bertani. Orang muda yang berasal dari rumahtangga yang memiliki sawah yang relatif luas akan lebih mudah menerima hibah sebagian sawahnya untuk dikelola pada saat sudah menikah. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka tidak membantu orangtua mereka di sawah. Mereka cenderung memiliki aktivitas (baik perkuliahan/pekerjaan) di luar desa, sehingga sawah – sawah milik orangtua mereka dikelola oleh orang lain. Sementara itu, orang muda yang berasal dari rumahtangga yang tidak memiliki sawah luas, cenderung akan bersama-sama dengan orangtua mereka mengolah sawah yang ada.

### **Perbandingan Pendapatan Antara Sektor Pertanian dengan Sektor Bukan-Pertanian (Baik di Desa dan di Luar Desa)**

Lapangan kerja di sektor pertanian padi masih merupakan alternatif pendapatan yang penting bagi banyak rakyat Indonesia, karena lapangan kerja pada sektor bukan-pertanian padi ada yang bersifat permanen tetapi ada juga yang bersifat musiman. Selain itu, ada pekerjaan yang sebenarnya bersifat permanen, namun hubungan kerja antara buruh dengan pengusahanya bersifat kontrak dalam jangka waktu tertentu, seperti buruh industri menengah besar yang ada di Cibalongsari atau buruh sawit di Malaysia. Berikut ini merupakan tabel pendapatan pertanian padi dan pendapatan bukan-pertanian pada 12 desa penelitian.

**Tabel 6**  
**Perbandingan Pendapatan Pertanian Padi dan Bukan-pertanian padi**  
**Tahun 2012-2013**

Pendapatan Pertanian Padi		Pendapatan Bukan-pertanian Padi	
Status Petani	Pendapatan/Ha /Bulan	Pekerjaan	Pendapatan
<b>Pemilik Lahan</b>	Rp 1.395.833	Buruh Pabrik	1.6 juta – 4 Juta / Bulan
<b>Pemilik sekaligus penggarap</b>	Rp 1.770.833	Buruh Sawit di Malaysia	2 Juta – 3 Juta / Bulan
<b>Penggarap dengan sistem gadai</b>	Rp 1.770.833	Buruh Bangunan	Tidak tentu, perhari 50 ribu – 100 ribu
<b>Penggarap(dengan sistem bagi hasil)</b>	Rp 385.416	Pegawai Fotokopi	300 ribu/Bulan
<b>Buruh Tani</b>	Rp 248.218	Penjual Baju/Sarung	1.5 – 2 Juta/Bulan
		Buruh Migran ke Korea	10 Juta – 20 Juta/Bulan
		Buruh Penjemur Gabah di Penggilingan	4 Juta/ 2 Bulan
		Buruh Penggilingan	3 Juta / 5 Bulan

*Sumber: Herawati dan Nugraha (2014)*

Tabel di atas memperlihatkan pendapatan bersih dari sektor pertanian dan bukan-pertanian. Pendapatan pada sektor pertanian padi relatif bervariasi jika dibandingkan dengan pendapatan bukan-pertanian padi. Gambaran di atas memperlihatkan bahwa pendapatan di sektor pertanian padi masih memberikan alternatif pendapatan yang relatif cukup besar bagi rumah tangga usahatani di pedesaan.

Pertanian masih merupakan peredam *shock* ekonomi yang penting bagi banyak rakyat Indonesia. Rumah tangga pertanian menyalurkan pendapatannya dengan hidup dengan lebih dari satu pekerjaan sekaligus: pertanian dan bukan-pertanian. Penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa re-produksi sosial di sektor pertanian berdasarkan usahatani kecil tetap terjadi, penyediaan tenaga kerja untuk sektor pertanian tetap dijamin re-produksi sosialnya (jumlah buruh tani dan petani kecil masih relatif stabil ke depan)

### **Mobilitas Tenaga Kerja: Pemuda/I Pergi atau Bertahan di Sektor Pertanian**

Berdasarkan penelitian pada 12 desa, terdapat pola-pola mobilitas yang dilakukan oleh tenaga kerja muda seperti melakukan *commuting*, dimana pekerja kembali ke rumah secara rutin. Pola mobilitas ini banyak ditemukan di Cibalongsari, dimana banyak pekerja di kawasan industri menengah dan besar. Pekerja yang melakukan *commuting* umumnya justru tidak lagi mengerjakan pekerjaan pertanian karena kerja bukan-pertaniannya relatif tetap. Migrasi sirkuler juga di temukan di desa-desa di Sulawesi Selatan seperti berdagang dan menambang emas, tetapi mereka masih kembali untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pertanian, seperti panen. Sedangkan pola mobilitas lainnya adalah melakukan migrasi (relatif) 'permanen', baik ke kota lain maupun luar negeri. Sebenarnya mobilitas pekerja ini tidak sepenuhnya permanen, karena pada beberapa desa penelitian kadang-kadang para migran muda justru bercita-cita untuk menabung supaya nantinya bisa membeli atau menyewa tanah pertanian di desa asal.

Pada dasarnya pemuda di 12 desa, masih terlibat di pekerjaan pertanian, bukan sebagai pengambil keputusan dalam manajemen usahatani, tetapi lebih sebagai buruh tani, baik sebagai pekerja keluarga (*family labor*) maupun buruh upahan (*wage labor*). Keterlibatan pemuda umumnya tidak di semua tahapan produksi. Pemuda laki-laki lebih banyak terlibat (dalam tahapan produksi) daripada perempuan. Faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan pemuda dalam bidang pertanian adalah kepemilikan dan peluang untuk mengakses tanah, baik melalui warisan, membeli, menyewa/bagi hasil/gadai. Faktor ekonomi muncul sebagai akibat ketiadaan tanah pertanian yang dapat diakses. Pemuda masih tertarik untuk berinvestasi untuk membeli/memiliki tanah pertanian tetapi hanya sebagai pemilik lahan dan bukan orang yang bertani.

#### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### Kesimpulan

1. Indonesia harus secara gamblang mengandalkan dan mendukung sistem pertanian skala kecil untuk sektor pangan (hal ini dilakukan demi produktivitas, tetapi juga demi prioritas lain seperti kesempatan kerja, pemerataan, dan keberlanjutan). Penggunaan efisiensi sosial sebagai kriteria keberhasilan pembangunan. Kriteria ini baik dari pada sekedar GDP atau *total cost benefit*. Kedua hal terakhir tidak menghitung efek pemerataan.
2. Usahatani padi yang sempit (sampai dibawah 0.25 ha) ternyata bisa mencapai produktivitas (per ha) yang tidak kalah dengan usahatani yang lebih luas (justru ada indikasi sering lebih tinggi).
3. Produktivitas tidak banyak dipengaruhi oleh status kepemilikan.
4. Akan tetapi, sistem pertanian skala kecil masih jauh dari praktik yang berkelanjutan dan terpadu, dan ini butuh solusi yang tepat. Hambatan yang paling sering dialami petani untuk meningkatkan produktivitas adalah serangan hama.
5. Untuk mengatasi hama, petani – petani sangat tergantung dengan pengetahuan yang (1) diberikan oleh penjual saprodi atau PPL yang seringkali didampingi oleh agen yang melakukan promosi pemberantas hama kimia, (2) melakukan banyak percobaan individual, baik secara alami atau mengoplos. Penggunaan pembasmi hama kimia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (selain menjadi beban biaya produksi signifikan).
6. Ada beberapa kecenderungan yang perlu menjadi perhatian, baik dari efisiensi sosial, yaitu struktur penguasaan atas tanah yang tidak merata (dan di beberapa desa sangat tidak merata, mendekati polarisasi) merupakan ancaman baik untuk kesempatan kerja dan pemerataan.
7. Pada saat ini pola akumulasi modal sudah berubah, struktur ekonomi tidak merata karena dahulu terkait dengan tanah, namun saat ini sudah bervariasi karena semakin kompleksnya dinamika antara sektor pertanian dan bukan-pertanian.
8. Relasi antar aktor mempengaruhi hubungan produksi pertanian di 12 desa ditemukan bahwa masih terdapat hubungan ketergantungan petani dengan sumber daya eksternal untuk melakukan reproduksi sosial, dan hubungan pertukarannya cenderung tidak menguntungkan bagi petani kecil.
9. Ketergantungan petani terhadap sumber daya eksternal masih tinggi sehingga mempersempit ruang pilihan bagi petani: contohnya masalah modal dan resiko sehingga mempengaruhi hubungan petani kepada aktor lain seperti pemilik alat produksi atau pemilik lahan luas. Bibit, pupuk bisa diakses, tetapi mayoritas mendapatkannya dengan hutang (begitu juga untuk saprodi lainnya).
10. Inovasi teknologi sangat penting pada sektor pertanian padi, namun pada saat ini justru ada teknologi tidak sejalan dengan efisiensi sosial sebagai tujuan pembangunan seperti yang memperkecil kesempatan kerja bertani, (b) mengalihkan sebagian nilai lebih dari golongan buruh tani yg berjumlah banyak ke golongan petani (yang cenderung lebih kaya) yang berjumlah sedikit [contohnya Atabela, hambur langsung, herbisida, combine harvester].
11. Khususnya untuk perempuan dari kalangan petani sempit/tidak bertanah, panen padi merupakan kesempatan kerja di desa yang menawarkan upah buruh yang relatif tinggi

(lebih tinggi dari beberapa upah buruh dari sektor bukan-pertanian), sehingga prospek masuknya *combine harvester* merupakan ancaman yang nyata yang sebaiknya dihindari dengan langkah-langkah kebijakan. Penggunaan *combine harvester* tidak menjawab masalah, oleh karena itu, pembelian dan kemudahan kredit untuk *combine harvester* justru menghambat efisiensi sosial.

12. Organisasi pertanian bentukan pemerintah yang ada saat ini adalah saluran ideal untuk memberikan bantuan kepada petani, bantuan dan pelayanan yang ditujukan untuk petani akan menyebar rata diantara petani.
13. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah yang seharusnya melayani kepentingan petani kecil tidak berfungsi. Lembaga bentukan masyarakat berpotensi berkembang namun tanpa ada dukungan pemerintah, cenderung akan menghilang.
14. Lembaga bentukan pemerintah maupun lembaga bentukan masyarakat banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka. Pada prakteknya, petani kecil tidak mempunyai wadah institusional (kelompok, asosiasi, serikat) yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi di tingkat lokal, atau memperjuangkan kepentingannya ditingkat atas.
15. Berbagai subsidi pertanian yang dialirkan ke desa (yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh semua petani) pada prakteknya sebagian besar di-*capture* oleh elit desa. Satu-satunya subsidi yang dinikmati banyak petani kecil adalah subsidi (harga) pupuk, namun pada kenyataannya petani kecil masih banyak yang berhutang sehingga nilai lebih keluar dari petani ke aktor lain.
16. Walaupun anggapan bahwa pertanian mengalami kekurangan tenaga kerja disebabkan keengganan pemuda/i desa untuk bertani benar; tetapi terdapat pemuda/I desa yang tertarik untuk bertani namun menghadapi masalah karena berbagai alasan seperti (1) akses tanah, (2) perbandingan net income antara sektor pertanian dan bukan-pertanian.
17. Keadaan diatas ikut mendorong mereka untuk bermigrasi keluar (meskipun migrasi ini tidak selalu permanen, kadang-kadang para migran muda justru bercita-cita untuk menabung supaya nantinya bisa membeli atau menyewa tanah pertanian di desa asal). Tidak perlu takut karena anak muda pasti akan kembali untuk bertani. Akan tetapi, Indonesia masih harus menunjukkan bahwa pertanian adalah sektor yang penting dan mengembangkan sektor pertanian artinya mengembangkan lapangan kerja.

## **Rekomendasi**

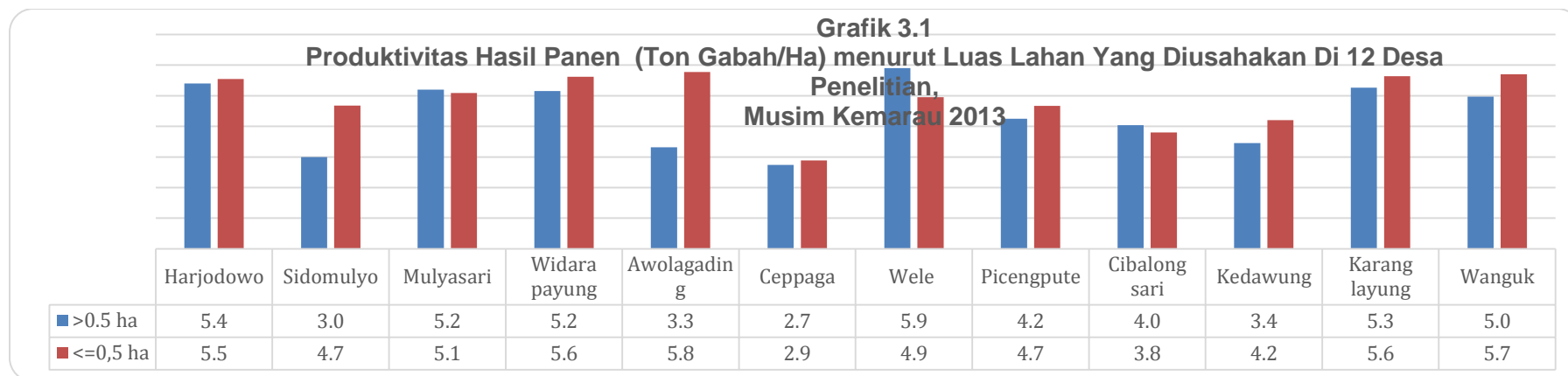
1. Pembentukan UU Desa yang baru sebaiknya pada desa-desa penghasil padi tercantum mekanisme agar para petani dapat mengakses tanah untuk penduduk miskinnya seperti tanah kas desa/kemakmuran. Selain itu UU Desa bisa menjadi momentum untuk mendorong pembatasan jumlah kepemilikan sawah dari bawah, misalnya dengan Peraturan Desa.

2. Pencegahan alih fungsi lahan sawah dengan cara memberikan insentif yang tinggi kepada pemilik sawah pada daerah-daerah lumbung padi. Pemberian insentif dalam bentuk kemudahan akses terhadap input pertanian dan jaminan harga hasil panen.
3. Untuk mencegah ketimpangan dari struktur ekonomi yang tidak merata, pemerintah harus mengembangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian di perdesaan. Sektor-sektor yang dikembangkan adalah sektor-sektor bukan-pertanian yang terkait dengan pertanian seperti pengolahan hasil pertanian desa yang masih tetap dilakukan di desa (pendirian Usaha Kecil Menengah di perdesaan). Pemerintah harus memberikan kepastian distribusi dan juga pemasaran hasil-hasil pengolahan dari desa ke kota dengan cara melakukan kerjasama dengan pedagang besar di perkotaan untuk menampung hasil produksi di perdesaan.
4. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap institusi yang sudah dibentuk secara lebih komperhensif. Seperti sistem audit yang tidak hanya bersandar pada data-data administratif, tetapi cek kembali siapa saja penerima manfaat dari bantuan, bentuk fisik dari bantuan tersebut, lakukan wawancara singkat terhadap anggota Poktan maupun petani yang ada di desa-desa penerima bantuan. Berikan insentif berupa uang atau program kepada Poktan maupun Gapoktan yang memenuhi sistem audit diatas.
5. Pemerintah harus mendorong institusi-institusi bentukan masyarakat baik dalam bentuk pendanaan maupun dalam bentuk program. Lakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap keberhasilan institusi-institusi bentukan masyarakat, kemudian Institusi bentukan masyarakat yang berhasil dijadikan percontohan dalam skala nasional untuk diterapkan di desa-desa pertanian lainnya.
6. Peningkatan produktivitas dengan cara pemerintah harus memprioritaskan penyediaan air untuk pertanian, terutama untuk desa – desa penghasil padi dengan mengembangkan infrastruktur pertanian dan menjaga pasokan air di hulu, pasokan input pertanian yang cukup, dan juga menggalakan mekanisme kepastian harga gabah kepada petani yang panen secara serempak. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan kembali tanam serempak yang sudah menurun dan menyediakan asuransi bagi petani jika mengalami gagal panen.
7. Mendorong teknologi tepat guna yang mendukung efisiensi sosial dengan sistem insentif.
8. Pemerintah harus memberikan pelatihan penggunaan pestisida alami secara lebih masif, melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah maupun lembaga-lembaga bentukan masyarakat. Berikan bantuan /program khusus dalam bentuk pestisida alami kepada para petani.
9. Koordinasi antara Kementrian Pendidikan dan Kementrian Pertanian untuk memberikan kurikulum yang mendorong pembentukan *image* petani yang bersifat positif.

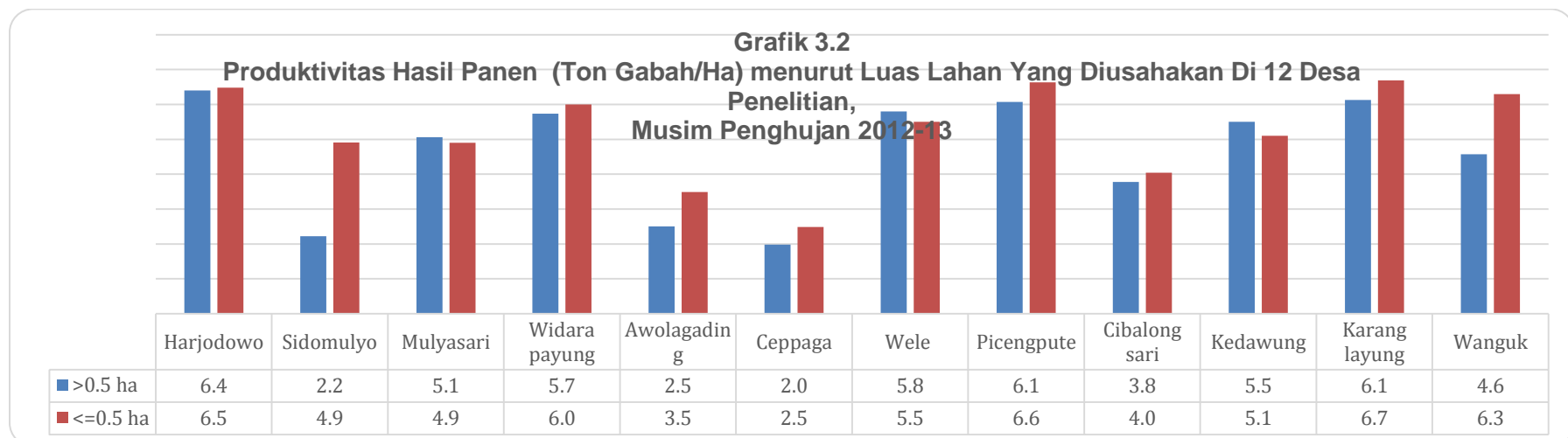
## Referensi

- Bank Dunia (2011) *Perkembangan Pemicudan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia, Edisi Maret 2011*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bernstein. H. (2010) *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publishing; VA: Kumarian Press.
- BPS (2009) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Social-Ekonomi Indonesia, Edisi Oktober 2009*. Jakarta: Biro Pusat Statistik
- BPS (2012) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Social-Ekonomi Indonesia, Edisi Agustus 2012*. Jakarta: Biro Pusat Statistik
- BPS (2013) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Social-Ekonomi Indonesia, Edisi Febuari 2013*. Jakarta: Biro Pusat Statistik
- de Koninck. R.. J. Rigg & P. Vandergeest (2012). 'A half century of agrarian transformations in Southeast Asia. 1960-2010'. in J. Rigg & P. Vandergeest eds *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press. pp. 25-37.
- Deere, Carmen Diana and Alain de Janvry (1979) *A Conceptual Framework for the Empirical Analysis of Peasants*. *American Journal of Agricultural Economics* Vol. 61, No. 4 (Nov., 1979).
- Faisal Kasryno (1983). *Prosek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- IPB (2014) *Jawa Krisis Pangan Jika Kita Tidak Mampu Mengelola Serangan Wereng Secara Benar* Press Release
- Jamex Fox (2014) *Fast Breeding Insect Devastates Java's Rice*  
<http://www.eastasiaforum.org/2014/03/05/fast-breeding-insect-devastates-javas-rice/>  
diakses pada tanggal 5 Juni 2014.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013) *Perkembangan Pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi*. Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Lipton, M. (2009) *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. New York: Routledge
- Rigg, J. And P. Vandergeest (eds.) 2012. *Revisiting Rural Places. Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press
- Setiajie, Iwan. Sumedi, Wardana (2008) *Gagasan dan Implementasi System ofRice Intensification (SRI) dalam Kegiatan Budidaya Padi Ekologis (BPE)*. Analisis Kebijakan Pertanian: Volume 6 no. 1, Maret 2008 : 75 – 99.
- UCW (2012) *Understanding children's work and unemployment outcomes in Indonesia: Country Report*. Rome: ILO-UNICEF-World Bank Understanding Children's Work Programme
- Van der Ploeg, J.-D. (2013) *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press
- White, Ben (2013) *Who Needs Corporate Farms? The Underlying Debate Behind Big Land Deals* for Public Seminar 'Land deals and rural transformation in Indonesia and The Philippines' in Bogor Agricultural University.

LAMPIRAN



Sumber : Pengolahan Survei Rumah Tangga

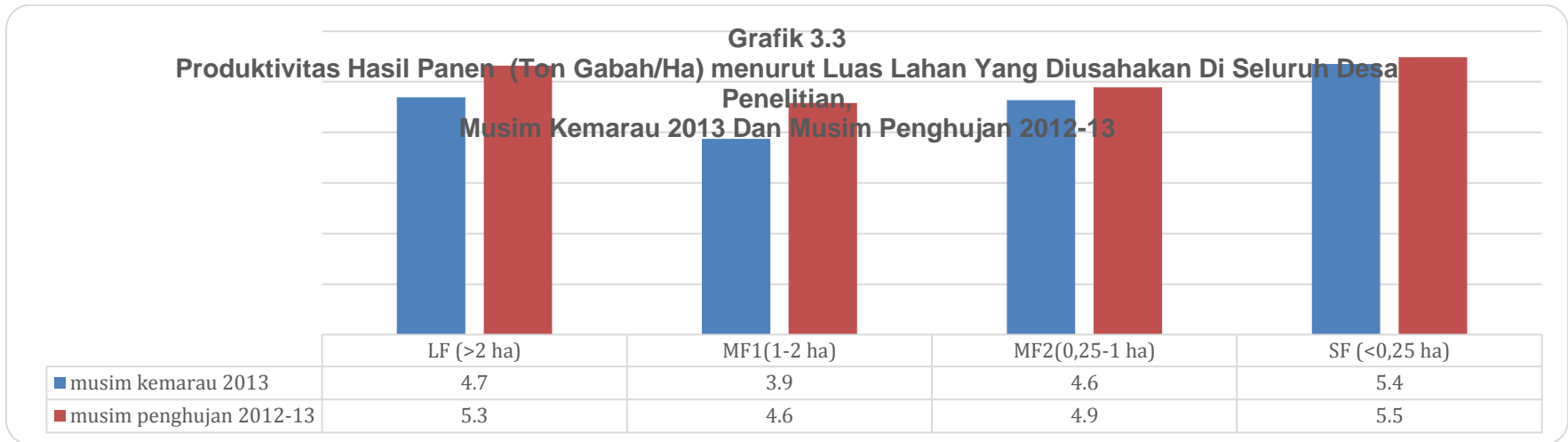


Sumber : Pengolahan Survei Rumah Tangga

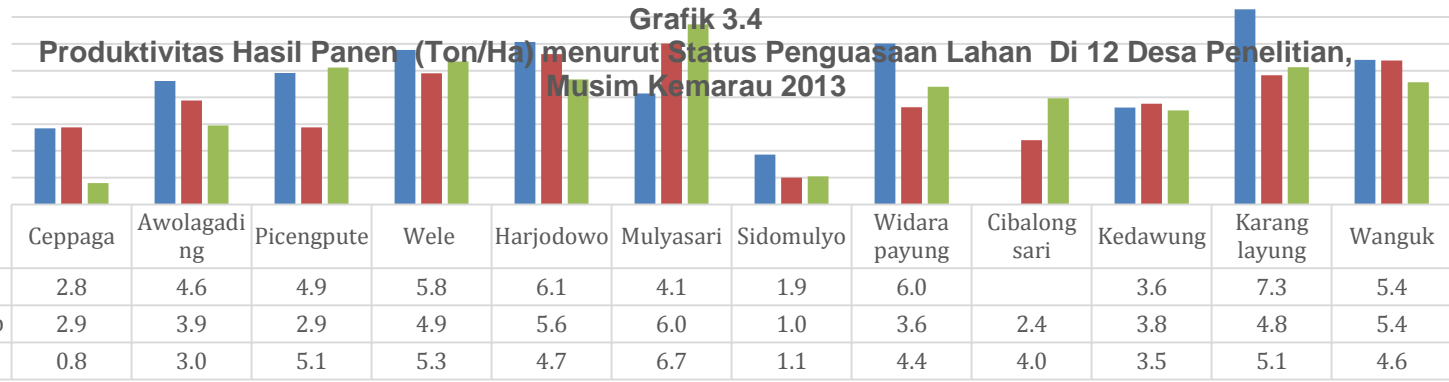
Catatan : Dalam penelitian ini terdapat desa dimana jumlah responden kurang dari 5 rumah tangga usahatani yaitu



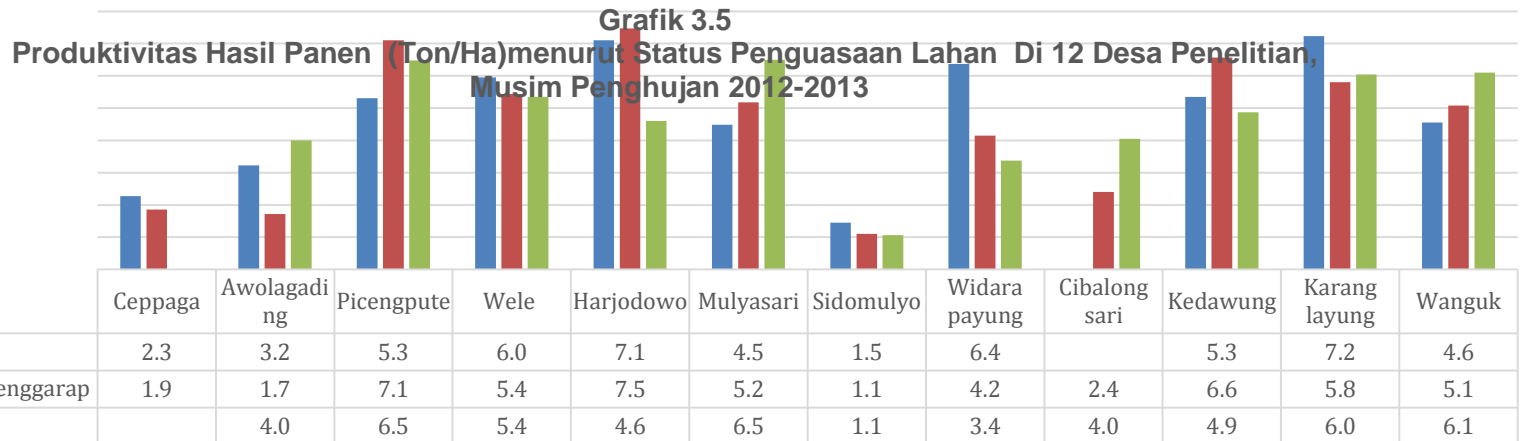
- > 0,5 ha yaitu Harjodowo dan Wele
- <=0,5 ha yaitu Kedawung dan Wanguk



Sumber :Pengolahan Survei RumahTangga



Sumber : Pengolahan Data Survei Rumah Tangga

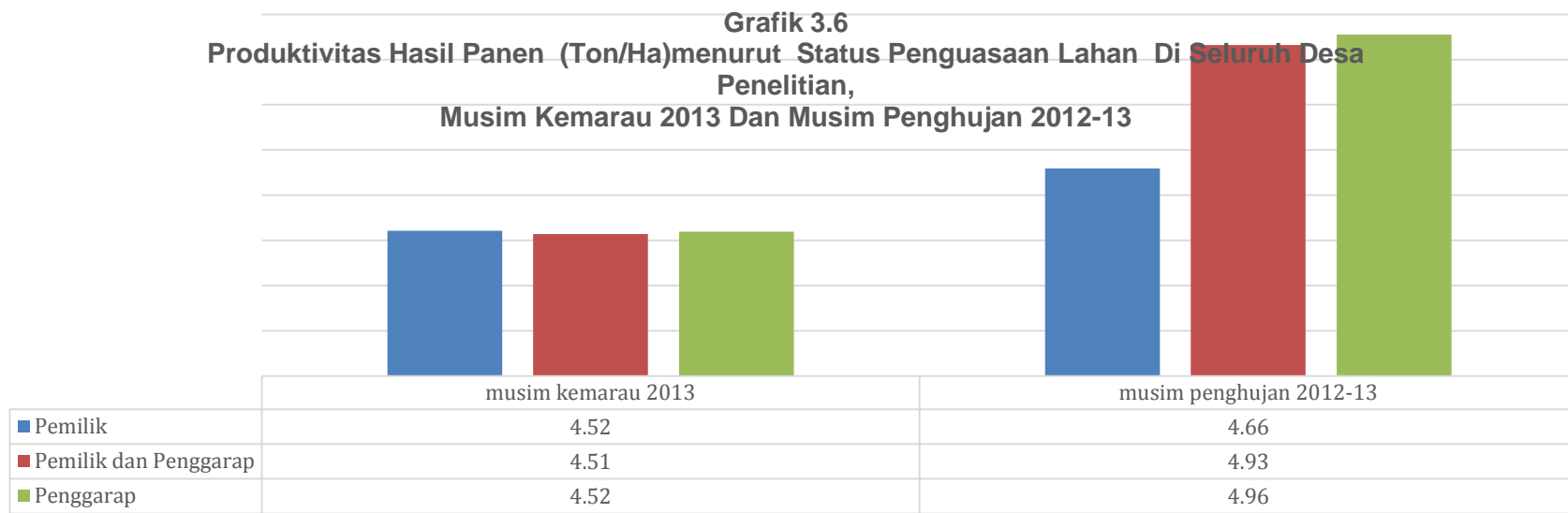


Sumber : Pengolahan Data Survei Rumah Tangga

Catatan : Dalam penelitian ini terdapat desa dimana jumlah responden kurang dari 5 rumah tangga usahatani yaitu

- Pemilik dan penggarap yaitu Sidomulyo, Widarapayung, Kedaung, Karanglayung
- Penggarap yaitu Ceppaga, Awolagading, Harjodowo, Mulyasari, Sidomulyo, Kedawung, dan Wanguk

**Grafik 3.6**  
**Produktivitas Hasil Panen (Ton/Ha) menurut Status Penguasaan Lahan Di Seluruh Desa Penelitian,**  
**Musim Kemarau 2013 Dan Musim Penghujan 2012-13**



Sumber : Pengolahan Data Survei RumahTangga

**Tabel 3. 7**  
**Rata-Rata Biaya Pestisida Pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Strata Petani	Harjodowo	Mulyasari	Widara payung	Sidomulyo	Ceppaga	Awola gading	Piceng pute	Wele	Cibalong sari	Kedawung	Wanguk	Karang layung
> 2 ha	n.a	0.39	n.a	0.02	0.07	n.a	0.34	0.15	1.20	1.85	0.47	2.38
1-2 ha	0.37	0.13	0.30	0.09	0.29	0.30	0.27	0.38	0.59	1.58	1.11	1.68
0,25-0,99 ha	0.11	0.30	0.40	0.14	0.30	0.23	0.38	0.17	0.67	0.96	0.81	1.10
<0,25	0.04	0.33	0.08	0.21	n.a	0.68	0.58	n.a	0.81	0.95	1.18	2.40
<b>rata-rata</b>	<b>0.17</b>	<b>0.29</b>	<b>0.26</b>	<b>0.11</b>	<b>0.22</b>	<b>0.40</b>	<b>0.39</b>	<b>0.23</b>	<b>0.82</b>	<b>1.34</b>	<b>0.89</b>	<b>1.89</b>

*Sumber :Pengolahan Survei RumahTangga*

**Tabel 3. 8**  
**Rata-Rata Biaya Pestisida Pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012-2013**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Strata Petani	Harjodowo	Mulyasari	Widara payung	Sidomulyo	Ceppaga	Awola gading	Piceng pute	Wele	Cibalong sari	Kedawung	Wanguk	Karang layung
> 2 ha	n.a	0.39	n.a	0.14	0.07	n.a	0.34	0.22	1.48	1.85	0.51	1.26
1-2 ha	0.28	0.10	0.26	0.06	0.29	0.08	0.28	0.36	0.59	1.36	0.91	1.09
0,25-0,99 ha	0.25	0.27	0.39	0.08	0.21	0.14	0.37	0.17	0.64	1.61	1.14	0.81
<0,25	0.41	0.28	0.07	0.17	n.a	0.64	0.58	n.a	0.75	0.93	1.89	1.79
<b>rata-rata</b>	<b>0.31</b>	<b>0.26</b>	<b>0.24</b>	<b>0.11</b>	<b>0.19</b>	<b>0.29</b>	<b>0.39</b>	<b>0.25</b>	<b>0.86</b>	<b>1.44</b>	<b>1.11</b>	<b>1.24</b>

*Sumber : Pengolahan Data Survei RumahTangga*

**Tabel 3.9****Persentase Penggunaan Biaya Pestisida Terhadap Total Biaya Produksi Pada 12 Desa Penelitian Musim Kemarau 2013**

Strata Petani	Harjodowo	Mulyasari	Widara payung	Sidomulyo	Ceppaga	Awola gading	Piceng pute	Wele	Cibalong sari	Kedawung	Wanguk	Karang layung
<b>&gt; 2 ha</b>		5.6		0.6	6.4		7.7	4.9	19.3	22.1	7.3	23.2
<b>1-2 ha</b>	13.7	2.4	4.5	2.0	12.7	6.8	6.7	8.6	10.4	21.7	10.6	18.6
<b>0,25-0,99 ha</b>	11.0	5.6	13.6	3.2	7.6	3.8	12.5	3.4	8.4	11.4	6.8	11.9
<b>&lt;0,25</b>	11.8	4.4	5.0	2.0		6.9	7.4		10.5	26.2	12.0	24.3
<b>rata-rata</b>	<b>12.2</b>	<b>4.5</b>	<b>7.7</b>	<b>1.9</b>	<b>8.9</b>	<b>5.9</b>	<b>8.6</b>	<b>5.6</b>	<b>12.2</b>	<b>20.4</b>	<b>9.2</b>	<b>19.5</b>

Sumber : Pengolahan Survei RumahTangga

**Tabel 3.10****Persentase Penggunaan Biaya Pestisida Terhadap Total Biaya Produksi Pada 12 Desa Penelitian Musim Penghujan 2012-2013**

Strata Petani	Harjodowo	Mulyasari	Widara payung	Sidomulyo	Ceppaga	Awola gading	Piceng pute	Wele	Cibalong sari	Kedawung	Wanguk	Karang layung
<b>&gt; 2 ha</b>		6.0		3.5	7.9		5.1	6.3	23.0	18.6	7.8	11.3
<b>1-2 ha</b>	13.1	1.9	3.8	1.4	11.9	3.0	5.5	8.5	9.3	15.9	9.7	11.2
<b>0,25-0,99 ha</b>	11.2	5.4	10.5	1.6	4.9	2.9	14.4	3.2	9.4	16.1	9.0	7.4
<b>&lt;0,25</b>	14.7	4.4	5.4	1.4		9.2	6.9		10.3	21.2	16.4	13.3
<b>rata-rata</b>	<b>13.0</b>	<b>4.5</b>	<b>6.6</b>	<b>2.0</b>	<b>8.2</b>	<b>5.0</b>	<b>8.0</b>	<b>6.0</b>	<b>13.0</b>	<b>18.0</b>	<b>10.7</b>	<b>10.8</b>

Sumber : Pengolahan Survei RumahTangga